

BAB 1

Pendahuluan

a. Pendahuluan

Sumber daya manusia merupakan sebuah komponen inti dalam sebuah peradaban, sebab manusialah yang menjadi otak dalam sebuah kemajuan budaya, teknologi, dan sains dalam sebuah peradaban. Terlebih di Indonesia yang nantinya akan menghadapi bonus demografi pada tahun 2030. Bonus demografi ini perlu diperhatikan dan dipersiapkan secara khusus karena dititik tersebut adanya bonus demografi dinilai dapat mendorong kemajuan sebuah bangsa jika dipersiapkan dengan baik.

Suatu hal yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan dalam bonus demografi yaitu ialah permasalahan sumber daya manusianya terutama di bidang kesehatan. Permasalahan kesehatan dapat menurunkan kualitas peradaban. Karena apabila insan dari sebuah negara memiliki permasalahan kesehatan maka hal ini menjadi sebuah hambatan untuk menjadi insan yang berkompeten dari negara lain. Sehingga hal ini akan merugikan sebuah negara dalam banyak aspek.

Insan berkualitas dapat dilihat dari tumbuh kembang manusia tersebut sedari masih dalam kandungan. Seorang insan berkualitas seharusnya dapat tumbuh kembang dengan baik dan sehat. Hal ini dapat disiasati dengan memperhatikan tumbuh kembang anak sedari dalam kandungan hingga berusia remaja. Fenomena ini berhubungan dengan asupan yang diterima bayi hingga usia remaja dengan gizi dan nutrisi yang diperlukan otak dalam tumbuh kembang anak.

Asupan untuk calon anak merupakan sumber awal perkembangan otak hingga dilahirkan menjadi bayi. Bayi dapat disebut sebagai bibit penerus untuk masa depan sebuah peradaban, Seorang bayi yang kelak menjadi insan berkualitas nantinya akan menentukan keadaan sebuah bangsa. Bayi yang sehat akan menjadi sosok

manusia yang cerdas. Namun, permasalahan gizi bayi hingga berumur lima tahun (balita) seringkali tidak diperhatikan secara mendalam oleh masyarakat umum sehingga menghadirkan sosok bayi dengan tumbuh kembang yang tidak baik (*stunting*)

Permasalahan gizi pada anak turut mencakup dalam tujuan *SDGs* (*Sustainable Development Goals*) pada poin ke-2 yaitu “Mengakhiri Kelaparan.” *SDGs* merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati pada tahun 2015 saat siding PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) dengan persetujuan para pemimpin dunia, termasuk Indonesia. Tujuan *SDGs* sendiri ialah menjaga peningkatan kualitas kehidupan, kesejahteraan ekonomi sehingga menjadikan suatu masyarakat menjadi madani dengan peningkatan kualitas kehidupan satu generasi ke generasi berikutnya.

Permasalahan gizi anak di Indonesia merupakan masalah serius yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat. Masalah gizi pada umumnya diakibatkan karena merupakan kelompok umur yang paling rawan menderita kekurangan gizi disamping defisiensi vitamin A dan anemia zat besi, dengan gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY) anak balita dapat dikatakan kurang energi protein (KEP). Kekurangan zat gizi pada anak balita dapat menyebabkan anak balita menjadi kurang gizi, infeksi penyakit dan mempengaruhi kecerdasan pada anak. Dampak dari kurang gizi adalah akan terganggunya pertumbuhan dan perkembangan pada anak balita.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1995/MENKES/SK/XII/2010 Tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak bahwa *stunting* adalah suatu keadaan dimana hasil pengukuran panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U) berada diantara -3 SD sampai -2 SD. Jika hasil pengukuran PB/U berada dibawah -3 SD disebut sangat pendek. Pembangunan kesehatan difokuskan pada empat program prioritas yaitu penurunan angka kematian ibu dan bayi, penurunan prevalensi balita pendek (*stunting*), dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular.

Berdasarkan hal tersebut jika diringkas, *stunting* merupakan kondisi tinggi badan anak yang lebih rendah dibandingkan dengan tinggi badan anak pada seusianya. Di Indonesia, kasus stunting masih menjadi masalah kesehatan dengan jumlah yang cukup banyak. Hal ini disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dengan manifestasi kegagalan pertumbuhan (*growth faltering*) yang dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Kekurangan gizi pada masa janin dan usia dini akan berdampak pada perkembangan otak dan lain sebagainya. Dalam jangka panjang, kekurangan gizi pada awal kehidupan akan menurunkan produktivitas dan kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan kesenjangan pada masyarakat.

Dalam Indonesia SDGs Corporate Summit (ISCOS) 2022, Wakil Presiden saat itu, Ma'ruf Amin, menegaskan komitmen Indonesia terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam upaya memberantas kemiskinan, kelaparan, dan malnutrisi. Salah satu fokus utama yang disorot adalah percepatan penurunan stunting, dengan target ambisius prevalensi stunting turun menjadi 14% pada tahun 2024. Beliau menekankan pentingnya kerja keras dan kerja cerdas dari seluruh elemen bangsa demi mewujudkan target tersebut.

Kini, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang resmi menjabat sejak Oktober 2024, upaya penanggulangan stunting tetap menjadi prioritas nasional. Pemerintah mencatatkan capaian signifikan, di mana prevalensi stunting telah turun dari 30,8% pada tahun 2018 menjadi 21,6% pada tahun 2023, dan lebih lanjut menurun menjadi 19,8% pada akhir 2024. Meski belum mencapai target awal 14%, angka ini menunjukkan tren penurunan yang positif.

Dengan melihat tantangan teknis dan sosial yang ada, pemerintah merevisi target prevalensi stunting tahun 2025 menjadi 18%. Target ini dinilai lebih realistis namun tetap ambisius, mengingat masih dibutuhkan penurunan sekitar 1,8% hanya

dalam waktu satu tahun. Untuk mencapainya, strategi yang diterapkan tidak hanya bersifat intervensi gizi langsung, tetapi juga menyentuh aspek sensitif seperti pendidikan anak usia dini, sanitasi, serta peningkatan kapasitas keluarga dan masyarakat.

Dalam menangani fenomena kesehatan *stunting*, Pemerintah Indonesia memiliki regulasi yang disiapkan secara khusus, yaitu Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *stunting*. Dalam peraturan menyuratkan bahwa Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* yang dilakukan secara khusus ialah menurunkan prevalensi *stunting*, meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses mutu pelayanan, dan meningkatkan akses air minum beserta sanitasi. Peraturan presiden tersebut merupakan arahan yang berlaku untuk seluruh pemerintah daerah. Sebagaimana sebagai kota metropolitan dan Ibukota Jawa Tengah, Kota Semarang ditengarai harus dapat memberi contoh aksi dalam penurunan prevalensi *Stunting* di Indonesia.

Stunting menjadi salah satu fokus Pemerintah Kota Semarang karena selaras dengan target dari Strategi Nasional Persiapan Generasi Indonesia Emas 2045. Hal ini menjadikan Kota Semarang menghadirkan peraturan khusus untuk menangani *stunting* yaitu Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Semarang hingga dibentuknya tim khusus percepatan *stunting* dengan dasar Surat Keputusan Walikota Nomor 050/468 Tahun 2022 sebagai bentuk keseriusan Kota Semarang dalam mempersiapkan penanganan *stunting*. Berdasarkan kebijakan tersebut terlahirlah produk kebijakan berupa program program kerja beserta arahan serentak lintas sektor untuk turut serta menghadapi *stunting* secara holistik dan terintegrasi.

Dari segi capaian Kota Semarang dalam RPJMD 2021-2026 Pemerintah Kota Semarang menargetkan prevalensi *stunting* sebesar 4% (empat) pada survey Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 dan 0% (nol) pada survey EPPGBM tahun 2024.. Disisi lain, capaian Pemerintah Kota Semarang cenderung membaik namun masih perlu upaya penekanan kasus. Khusus untuk kasus *stunting* di Kota Semarang jumlahnya masih fluktuatif selama 7 tahun terakhir dari tahun 2016 hingga tahun 2023, bahkan adanya peningkatan kasus baru yang cukup signifikan pada tahun 2018 (Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2023). Hal ini menjadi ancaman nyata bagi Kota Semarang terkait kelangsungan kualitas hidup tumbuh kembang anak nantinya. Meskipun pemerataan pelayanan kesehatan anak sudah dilakukan oleh puskesmas dan posyandu yang ada, namun hal ini belum cukup. Perlu ada tekanan regulasi bahwa peningkatan kesehatan ibu juga merupakan pekerjaan pemerintah kota yang lintas sektor karena sampai saat ini selain terkendala oleh pengetahuan tentang kesadaran gizi keluarga yang minim juga karena kondisi sosial ekonomi.

Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan serangkaian program kerja yang terstruktur dan komprehensif untuk mempercepat penurunan angka *stunting* di wilayahnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 45 Tahun 2023. Program-program ini dirancang untuk mengatasi masalah *stunting* melalui intervensi perilaku kunci yang berfokus pada enam aspek penting dalam kehidupan masyarakat, mulai dari ibu hamil hingga keluarga secara keseluruhan disebut “Fokus Utama Program: Enam Perilaku Kunci Pencegahan *Stunting*”

Strategi komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat ini menjadi pilar kedua dari lima pilar utama dalam percepatan penurunan *stunting* di Kota Semarang. Program-program ini mencakup berbagai kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan memicu perubahan perilaku positif di masyarakat. Berikut adalah program kerja berdasarkan enam perilaku kunci:

1. Mendorong Ibu Hamil dan Remaja Putri Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)

Program ini dimulai dengan koordinasi tahunan melalui pertemuan Rembug Stunting. Dalam pertemuan ini, berbagai pihak seperti Kader Pembangunan Manusia (KPM), perwakilan Puskesmas, aparaturnya kelurahan dan kecamatan, serta Kader PKK dan organisasi lintas sektoral, berkumpul untuk membahas masalah gizi di masyarakat, khususnya data kesehatan ibu hamil dan remaja putri.

Aspek advokasi dilakukan pada semester pertama dengan menguatkan kolaborasi lintas sektor. Diskusi dan Focus Group Discussion (FGD) diadakan bersama pemerintah kota, kecamatan, kelurahan, sekolah, dan pondok pesantren untuk menyosialisasikan manfaat TTD dan kebijakan pusat terkait konsumsinya. Mobilisasi sosial dilakukan setiap dua bulan melalui kegiatan penjangkauan di Posyandu. Aktivitas ini dikemas menarik dengan permainan interaktif dan

Seluruh kegiatan ini dipantau dan dievaluasi setiap semester melalui pertemuan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan lintas sektor, yang berpedoman pada kerangka acuan kerja dan data capaian.

2. Memastikan Ibu Hamil Mengikuti Kelas Ibu Hamil Minimal 4 Kali untuk Edukasi Gizi dan Konseling

Seperti perilaku kunci pertama, program ini diawali dengan koordinasi tahunan melalui Rembug Stunting untuk membahas isu gizi dan kesehatan ibu hamil. Advokasi dilakukan pada semester pertama dengan menguatkan lintas sektor melalui diskusi dan FGD bersama pemerintah kota, kecamatan, dan kelurahan. Fokusnya adalah sosialisasi manfaat kelas ibu hamil dan kebijakan terkait.

Mobilisasi sosial diwujudkan melalui kegiatan konseling di kelas ibu hamil setiap dua bulan, dengan materi edukasi gizi dalam bentuk poster dan *banner*.

Pemantauan dan evaluasi program ini juga dilakukan setiap semester melalui pertemuan TPPS dan lintas sektor.

3. Menerapkan Praktik Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) Sesuai Anjuran

Koordinasi lintas sektoral dilakukan pada semester pertama dengan melibatkan kelurahan, kecamatan, dan OPD terkait seperti PKK, Dinas Kesehatan, DP3A, dan Kemenag. Diskusi berfokus pada cakupan ASI eksklusif dan tumbuh kembang bayi. Advokasi juga dilaksanakan pada semester pertama melalui diskusi dengan pimpinan OPD dan perusahaan mengenai pemenuhan bahan pangan untuk PMBA serta penyediaan ruang laktasi di tempat kerja.

Mobilisasi sosial berupa sosialisasi pentingnya PMBA kepada masyarakat umum dan kegiatan penjangkauan di Posyandu dilakukan secara periodik. Sosialisasi ini melibatkan pemuka agama, keluarga, dan organisasi profesi. Materi yang disampaikan adalah pentingnya ASI eksklusif dan PMBA untuk tumbuh kembang bayi dan baduta. Kampanye publik dilakukan enam kali setahun, mencakup demonstrasi masak MPASI gizi seimbang, *talkshow* di televisi dan radio, seminar, serta promosi di media sosial. Pemantauan dan evaluasi dilakukan setiap semester melalui pertemuan lintas sektoral periodik untuk pelaporan dan koordinasi.

4. Membawa Anak ke Posyandu untuk Pemantauan Tumbuh Kembangnya

Koordinasi dimulai pada semester pertama dengan pembentukan Pokja KPP dan dilanjutkan dengan pertemuan bulanan Pokja KPP Stunting. Pertemuan ini melibatkan PKK, Dinas Kesehatan, DP3A, Kemenag, Kader PKB, PPKBD, kelurahan, kecamatan, dan OPD. Advokasi pada semester pertama mencakup sosialisasi kebijakan stunting dan diskusi dengan redaksi media untuk menyebarluaskan informasi pentingnya Posyandu.

Mobilisasi sosial dilakukan setiap bulan melalui pertemuan rutin PKK yang membahas pentingnya Posyandu. Selain itu, komunikasi antar pribadi di Posyandu dilakukan untuk memberikan konseling dan edukasi tumbuh kembang anak. Pemantauan dan evaluasi dilakukan pada semester kedua untuk pengembangan rencana Monev KPP, serta kuartal kedua untuk diskusi dengan mitra universitas.

5. Menerapkan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan Air Mengalir

Koordinasi lintas sektoral dilakukan pada semester pertama dengan melibatkan berbagai dinas terkait seperti Dinkes, Disperkim, Disdik, Diskominfo, Disdalduk dan KB, DP3A, PKK, DPU, Kemenag, kelurahan, dan kecamatan. Advokasi berupa sosialisasi dukungan kebijakan CTPS juga dilaksanakan pada semester pertama.

Mobilisasi sosial dilakukan pada semester pertama melalui sosialisasi dan edukasi CTPS dalam pertemuan rutin kader Posyandu/Kesehatan, Kader KB, lembaga masyarakat (PKK, Karang Taruna, RT/RW), kader/guru PAUD HI, majelis taklim, serta pada peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Anak Nasional. Pemantauan dan evaluasi dilakukan pada semester kedua untuk pengembangan rencana Monev KPP.

6. Menggunakan Jamban Sehat

Koordinasi lintas sektoral dilakukan pada semester pertama dengan OPD terkait seperti Bappeda, Dinkes, dan Disperkim. Advokasi pada semester pertama mencakup sosialisasi STBM kepada OPD terkait, DPRD Kota Semarang, dan Pemerintah Kota Semarang. Selain itu, sosialisasi kebijakan jamban sehat juga dilakukan kepada media.

Mobilisasi sosial berupa sosialisasi kebijakan jamban sehat dilakukan pada semester pertama melalui pertemuan kelompok RT di tingkat kecamatan.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan pada semester kedua untuk pengembangan rencana Monev KPP.

Secara keseluruhan, strategi komunikasi ini dirancang untuk memastikan bahwa keenam perilaku kunci dapat dilaksanakan secara optimal, dengan harapan dapat menurunkan angka stunting dan menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas di Kota Semarang.

Kota Semarang melakukan pendataan kasus *stunting* menggunakan 2 (dua) survey, yaitu E-PPGBM dan SSGI. E-PPGBM merupakan sistem elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat yang memuat data hasil pengukuran pelaporan gizi yang dientri setiap bulan oleh puskesmas dan dikelola oleh dinas kesehatan kota setempat, sedangkan untuk SSGI adalah evaluasi status gizi secara nasional yang dilakukan oleh Badan Litbangkes dalam suatu survei yang dilaksanakan setahun sekali. Dalam hal ini keduanya memang digunakan dalam pengukuran *stunting* namun terdapat perbedaan pengumpulan data.

Tabel 1 1.

Perbedaan Survey E-PPGBM dengan SSGI

	E- PPGBM	SSGI
Periode	Setiap bulan (data <i>real-time</i>)	Setiap tahun
Pelaksana	Puskesmas gizi puskesmas	Enumerator terlatih (Balitbangkes)
Sasaran	Seluruh balita di posyandu	Sampel rumah tangga dengan balita
Tujuan	Surveilans program gizi di daerah	Evaluasi kemajuan intervensi gizi

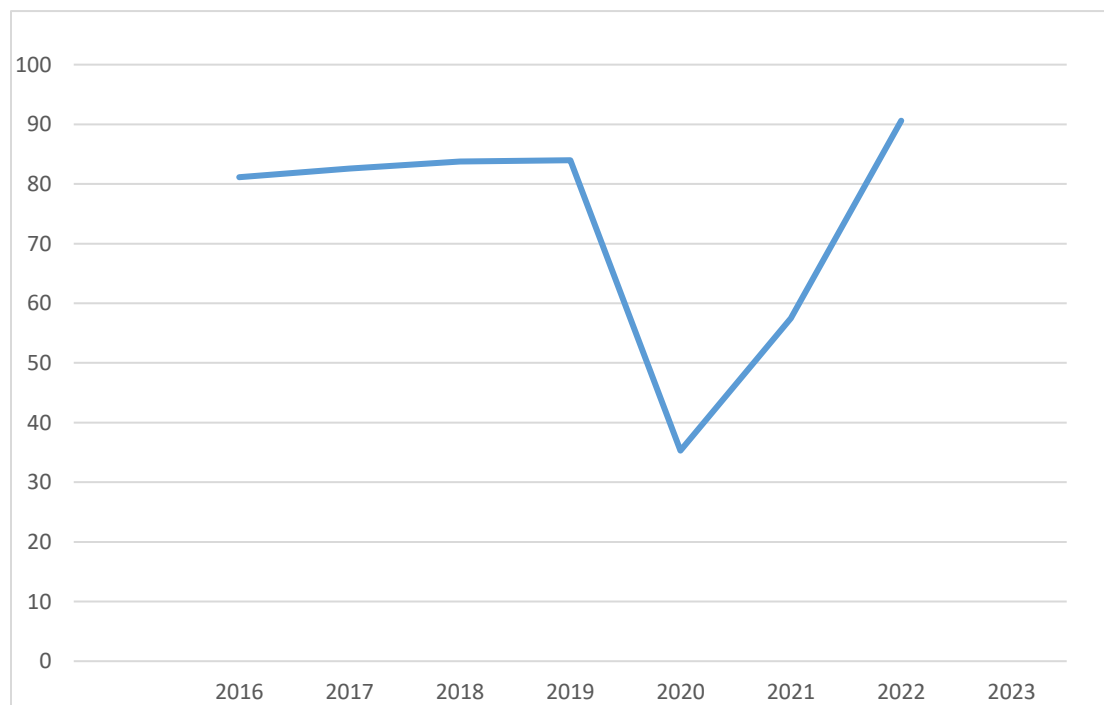
Sumber: (Bappenas, 2021)

Pada bahasan ini, Pemerintah Kota Semarang telah menargetkan prevalensi *stunting* dengan 2 survey tersebut, yaitu survey E-PPGBM dengan target 4% (empat) pada tahun 2026 dan SSGI dengan target 0% (nol) pada tahun 2024. Pada dasarnya SSGI digunakan sebagai Pemerintah Kota untuk mengambil kebijakan dalam pengambilan kebijakan, sedangkan E-PPGBM digunakan sebagai bentuk intervensi kebijakan sehingga keduanya dimanfaatkan dengan baik.

Dalam sebuah survey E-PPGBM data yang dibutuhkan ialah Capaian D/S (tingkat partisipasi masyarakat terhadap kegiatan posyandu) dan kasus BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) sehingga terkumpul data berupa hasil prevalensi *stunting* dari setiap kecamatan yang diperbarui setiap bulan.

Grafik 1 1

Grafik Capaian D/S Kota Semarang 2016-2022



Sumber: (Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2022)

Grafik D/S adalah capaian yang menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan di posyandu. Grafik ini dinilai penting dalam pendataan, pengklasifikasian, pembimbingan, hingga pemberian bantuan atas permasalahan kesehatan balita yang ditimbang. Grafik diatas menunjukkan Cakupan D/S di Kota Semarang yang mengartikan bahwa adanya peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan 2019 dan terjadi penurunan pada tahun 2020 kemudian ada peningkatan kembali pada tahun 2021 dan 2022. Tidak dipungkiri bahwa penurunan capaian Kota Semarang pada tahun 2020 dan tahun 2021 disebabkan oleh Covid-19 yang memiliki dampak besar terhadap kehidupan sosial kebermasyarakatan sehingga mempengaruhi banyak implementasi kebijakan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Dalam grafik tersebut jika dirincikan bahwa cakupan D/S yang ada di Kota Semarang pada tahun 2014 sebesar 81,14%, pada tahun 2015 sebesar 82,59%, pada tahun 2016 sebesar 83,77%, pada tahun 2017 sebesar 83,96%, pada tahun 2018 sebesar 83,77%, pada tahun 2019 sebesar 83,96%, pada tahun 2020 sebesar 35,4%, pada tahun 2021 sebesar 57,5%, dan pada tahun 2022 sebesar 90, 6%. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan D/S antara lain dengan kegiatan sosialisasi dan promosi di Posyandu melalui kader baik secara daring maupun luring, pemenuhan sarana antropometri Posyandu, meningkatkan kemampuan kader dalam pemantauan pertumbuhan dengan KMS, dan pembinaan kader Posyandu yang bekerja sama dengan lintas sektor terkait.

Tabel 1 2

Kasus BBLR Kota Semarang tahun 2019-2022

Tahun	Jumlah Kasus BBLR
2019	834
2020	740
2021	609
2022	598
2023	580

Sumber: (Dinas Kesehatan Kota Semarang, p. 2023)

Tabel di atas menunjukkan tren jumlah kasus Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) di Kota Semarang dari tahun 2019 hingga 2023. Data ini menunjukkan penurunan konsisten dari 834 kasus pada tahun 2019 menjadi 580 kasus pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan adanya upaya intervensi gizi ibu hamil dan pemantauan kehamilan yang semakin efektif. Namun, penurunan yang melambat dalam dua tahun terakhir menandakan perlunya peningkatan kembali program pencegahan BBLR secara lebih spesifik dan terfokus, terutama untuk kelompok risiko tinggi seperti ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK) atau anemia.

Tabel 1 3

Perkembangan Balita *Stunting* di Kota Semarang 2014-2023

Perkembangan Balita <i>Stunting</i> di Kota Semarang Tahun 2014-2023										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Prevalensi <i>Stunting</i>	4,06%	4,10%	3,66%	2,63%	2,50%	2,57%	3,13%	3,10%	1,66%	1,06%
Jumlah balita <i>stunting</i> dengan balita yang diukur	4308 dari 103.276 balita yang diukur	4381 dari 106.059 balita	3415 dari 106.769 balita	2385 dari 101.98 balita	2478 dari 107.978 balita	2759 dari 107.071 balita	3143 dari 100.446 balita	1367 dari 44.058 balita	1.416 dari 85.331 balita	872 dari 81.912 balita

Sumber: (Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2025)

Pada tabel diatas menunjukkan ada peningkatan jumlah balita yang diukur dari tahun 2016 sampai dengan 2019 dan terjadi penurunan pada tahun 2020 kemudian mulai ada peningkatan kembali pada tahun 2021 hingga 2023. Hal ini berhubungan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang menghambat kegiatan penimbangan di lapangan.

Jumlah balita *stunting* semua mendapat perawatan yang meliputi pemeriksaan gizi buruk secara komprehensif. Sejak tahun 2014, Kota Semarang telah mempunyai “Rumah Gizi” yang difungsikan antara lain untuk penanganan balita gizi buruk secara komprehensif dengan rawat jalan. Perawatan gizi buruk secara komprehensif meliputi pengukuran antropometri dan penentuan status gizi, pemeriksaan laboratorium dan rontgen, pemeriksaan dokter, deteksi tumbuh kembang balita, pelayanan fisioterapi,

pelayanan konseling gizi, pemberian makan tambahan (PMT) dan paket susu khusus untuk balita bergizi buruk (F100) selama minimal 6 bulan, pemerian vitamin, penyuluhan, serta pendampingan oleh tenaga kesehatan dan kader. Program ini merupakan upaya perbaikan status gizi pada balita gizi buruk yang telah di pusatkan di Rumah Gizi Jl. Nusa Indah No.12 Banyumanik Semarang. Pada penanganan gizi buruk dilakukan bersama dengan lintas sektoral, lintas program, organisasi profesi dan LSM (Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, BAPPEDA, Bidang P2P DKK, BKPM, RSDK, IDAI, IFI, Laboratorium Prodia, Tim Penggerak PKK Kota Semarang, Rumah Zakat, PKPU, Aisyiah, dan WKRI).

Sebuah prevalensi *stunting* dapat ditinjau dari status gizi balita. Dalam hal ini perkembangan keadaan gizi masyarakat dapat dipantau melalui hasil pencatatan dan pelaporan program perbaikan gizi masyarakat yang tercermin dalam hasil penimbangan bayi dan balita setiap bulan di posyandu.

Data selanjutnya yang dipertimbangkan ialah Survey Status Gizi Nasional (SSGI). SSGI sebelumnya dilaksanakan pada 5 tahun sekali kini dilaksanakan setahun sekali dimulai dari tahun 2021 oleh Badan Litbangkes. Hal ini memberikan sebuah kemudahan bagi Kota Semarang untuk melakukan *tracking* kemudian memberikan bantuan kepada pihak yang membutuhkan. Meski secara umum SSGI mengukur 4 indikator dalam SSGI yaitu *stunting*, *wasting* (berat badan menurun dibawah rentang normal), *underweight* (berat badan dan indeks massa tubuh dibawah normal), dan *overweight* (penimbunan jaringan lemak atau nonlemak pada bayi yang tidak normal) namun 4 hal tersebut berhubungan dengan kualitas tumbuh kembang anak yang perlu dibenahi.

Tabel 1 4

Survey Studi Status Gizi Indonesia (SSGI)

SSGI Kota Semarang		
SSGI 2021	SSGI 2022	Selisih
21,3 %	10,4%	-10,9%

Sumber: (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023)

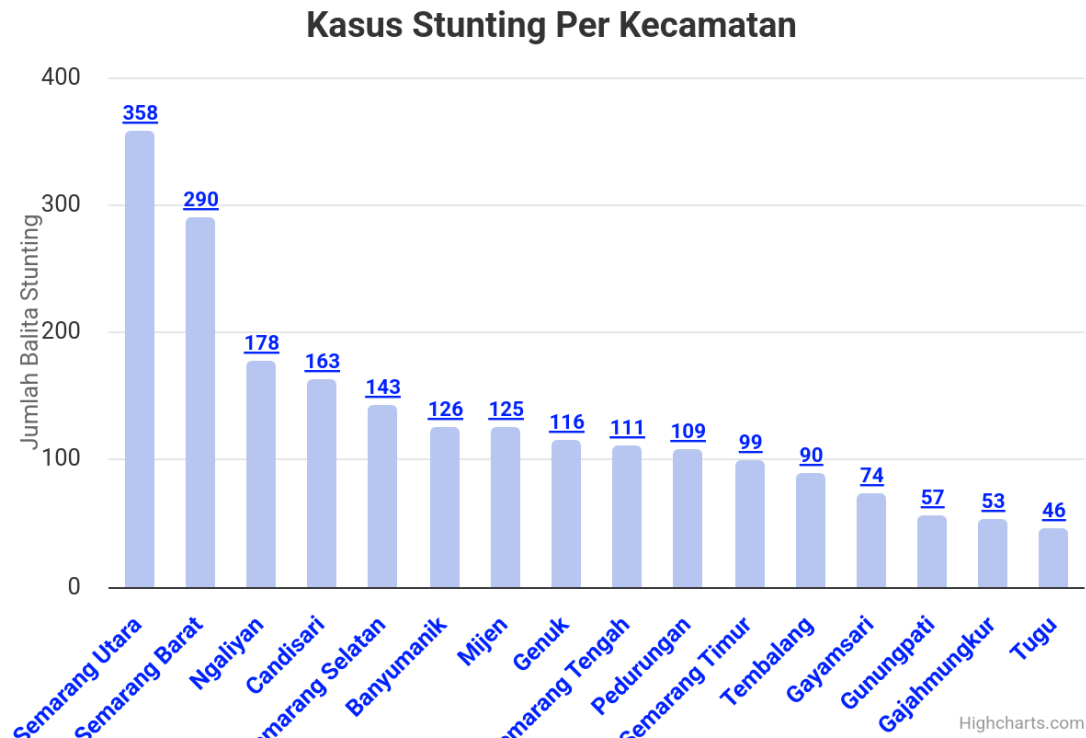
Jika dilihat dari tabel tersebut dinilai selisih kemajuan Kota Semarang pada SSGI tahun 2021 dengan tahun 2022 cukup signifikan, namun jika dilihat fenomena kebermasyarakatan yang ada di Kota Semarang pada tahun 2021 merupakan tahun pandemi Covid-19 yang dimana proses berjalannya SSGI dinilai tidak maksimal sehingga pada tahun 2022 dimana kondisi kebermasyarakatan di Kota Semarang sudah pulih menghasilkan perbandingan yang sangat jauh.

Sedangkan berdasarkan data dari Situs Web Semarang Satu Data, pada tahun 2022 sebanyak 1,6 % balita dari total kelahiran di Kota Semarang mengalami stunting. Sedangkan untuk kasus *stunting* anak dibawah dua tahun (Baduta) sebanyak 1,27%. Sedangkan, Jumlah Balita dan Baduta penderita *stunting* tersebut tersebar di 153 kelurahan di Kota Semarang sehingga target capaian 0% dalam RPJMD Kota Semarang 2021-2026 dinilai merupakan target yang besar untuk dicapai Pemerintah Kota Semarang karena hal ini memerlukan kinerja Pemerintah Kota Semarang yang optimal dalam upaya percepatan penurunan *stunting* yang holistik, integratif, dan bersinergi antar pemangku kepentingan.

Persoalan *Stunting* di Kota Semarang tidak lepas dari kasus *Stunting* terbanyak di Kota Semarang yaitu dari Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang utara yang mana per-April tahun 2024 memiliki kasus sebanyak 11,45% dari total keseluruhan kasus *Stunting* di Kota Semarang (Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2025). Permasalahan *Stunting* di Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara

tentunya dapat dibilang sebagai momok pemasalahan *Stunting* yang ada di Kota Semarang.

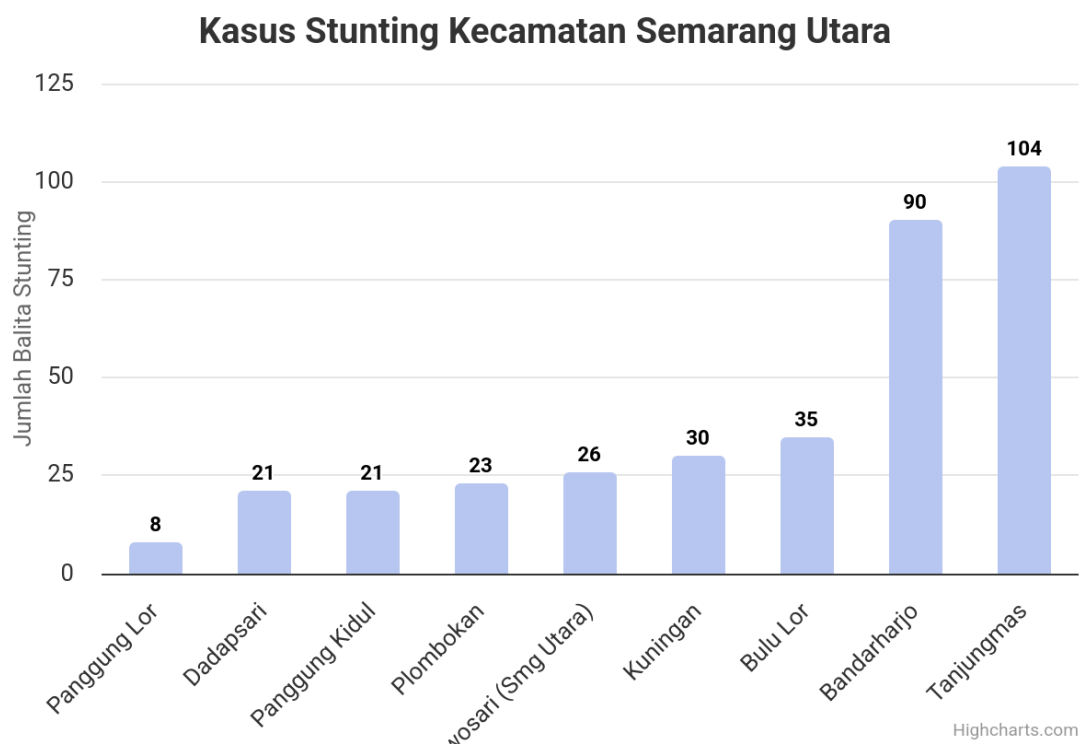
Gambar 1 1 Kasus Stunting Per Kecamatan di Kota Semarang Bulan April Tahun 2025



Sumber: (Dinas Kesehatan Kota Semarang, p. 2025)

Berdasarkan data diatas, dapat dipastikan bahwa Kecamatan Semarang Utara merupakan Kecamatan dengan kasus *Stunting* terbanyak di Kota Semarang. Namun jika ditelaah lagi, Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara memiliki catatan *Stunting* terbanyak di Kecamatan Semarang Utara

Gambar 1 2 Kasus Stunting Kelurahan yang ada di Kecamatan Semarang Utara Bulan April 2024

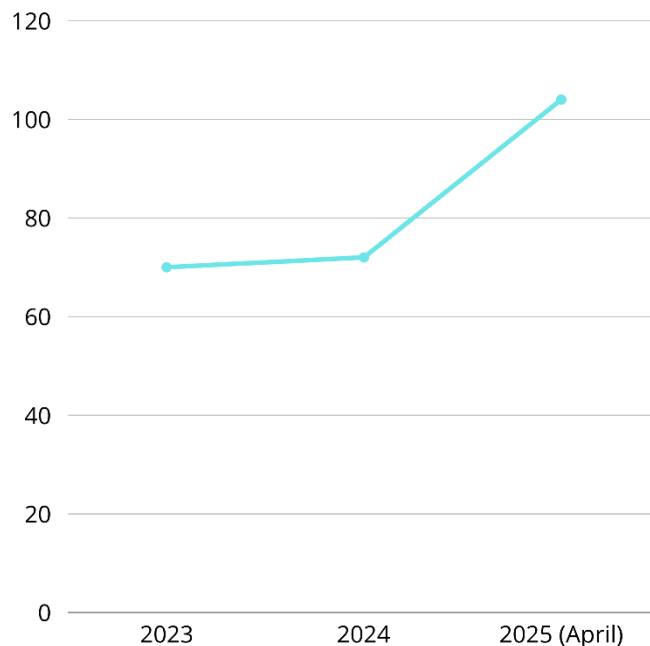


Sumber: (Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2025)

Data diatas menjelaskan bahwa kasus *Stunting* yang ada di Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara lebih besar dari kasus-kasus lain dari beberapa kelurahan dan kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya temuan yang perlu ditelaah sehingga menaruh empati peneliti untuk menganalisis implementasi kebijakan percepatan penanganan *Stunting* di Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara. Terlebih kebijakan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2022 telah menetapkan langkah-langkah konvergensi dalam penanganan *Stunting* sehingga fokus dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2023 di Kecamatan Semarang Utara.

Penelitian ini didasari karena dalam RPJMD Kota Semarang 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Semarang tahun 2021-2026 yang menargetkan bahwa prevalensi kasus *stunting* di Kota Semarang sebesar 0% Survey E-PPGBM. Dengan target yang besar maka sudah seharusnya sejalan dengan kinerja yang besar juga. Disisi lain, percepatan penanganan *Stunting* termasuk dalam empat isu strategis yang harus ditangani oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu penelitian ini membahas tentang “Analisis Implementasi Kebijakan Percepatan Penanganan *Stunting* di Kota Semarang.” Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Pemerintah Kota Semarang yang berperan menjadi regulator dalam permasalahan strategis ini.

Grafik 1 2 Grafik Prevalensi Stunting Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang



Sumber: (Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2025)

Berdasarkan data tersebut terlihat adanya kenaikan pada kasus prevalensi *Stunting* di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang. Hal ini menunjukkan bahwa adanya permasalahan dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan *Stunting*

yang ada. Hal ini menjadikan Kelurahan Tanjung Mas sebagai lokus pada penelitian ini.

Dalam menganalisa kasus *Stunting* di Kota Semarang, dapat dipahami bahwa telah terjadinya sebuah fenomena teori penyelenggaraan negara yang terdapat dalam perspektif Ilmu Administrasi Publik yaitu implementasi kebijakan. Istilah implementasi kebijakan merupakan sebuah konsep yang bukan sekedar pelaksanaan dari sebuah kegiatan. Implementasi adalah sebuah proses yang rumit dan kompleks karena memiliki ikatan waktu dan prosedur yang sesuai, bahkan produk kegiatan dari kebijakan yang sudah dilakukan tepat waktu tidak berarti sudah terimplementasi dengan baik. Pada kasus ini implementasi kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam percepatan penanganan *stunting* tentunya tidak jauh dari teori Ilmu Administrasi Publik.

1. 2. Identifikasi Masalah

1. Kelurahan Tanjung Mas merupakan kelurahan dengan kasus *Stunting* terbanyak di Kota Semarang
2. Prevalensi *Stunting* di Kelurahan Tanjung Mas semakin naik

1. 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka perumusan masalah dalam makalah ini adalah

1. Bagaimana kontrol implementasi kebijakan percepatan penanganan *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang?
2. Apa faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan percepatan penanganan *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang?

1. 4. Tujuan Penelitian

Secara umum, merupakan sebuah rencana yang ditetapkan sebelum penelitian dilaksanakan. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai berdasarkan perumusan masalah diatas sebagai berikut:

- A. Untuk menganalisa implementasi kebijakan percepatan penanganan *Stunting* di Kelurahan Tanjung Mas.
- B. Untuk menganalisa adanya faktor pendukung dan penghambat pada implementasi kebijakan percepatan penanganan *Stunting* di Kelurahan Tanjung Mas.

1. 5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan dampak dari pencapaian sebuah tujuan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik terutama terhadap sebuah bentuk pelayanan publik di bidang pemberdayaan manusia serta menjadi bahan kajian studi banding dalam rangka penelitian berikutnya. Penelitian ini ditujukan juga dapat digunakan sebagai pijakan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan peran Pemerintah Kota Semarang dalam menghadapi kasus *Stunting*.

1. 6. Kerangka Teori

1.6.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.5. Penelitian Terdahulu

No mo r	Peneliti	Judul jurnal	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Widya Hary Cahyati, 2019)	Kajian <i>Stunting</i> di Kota Semarang	Mengetahui kondisi <i>Stunting</i> di Kota Semarang beserta strategi penanganannya	Permasalahan yang muncul terkait dengan stunting adalah bagaimana proses penanganan stunting ini yang membutuhkan penanganan lintas sektoral dan dimensional dan memerlukan sinergitas antar para pihak untuk dapat mencegah dan menanggulangi stunting di Indonesia, khususnya Kota Semarang
2.	(Sukri Palutturi, 2020)	<i>Stunting In a Political Context: A Systematic Review</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh aspek politik terhadap adanya permasalahan <i>stunting</i> di suatu negara dan wilayah	Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara dukungan atau komitmen politik pemerintah dengan kejadian <i>stunting</i> pada anak. Negara dan pemimpin regional yang memberikan perhatian terhadap penanganan <i>stunting</i> dapat menurunkan prevalensi <i>stunting</i> . Komitmen tersebut ditunjukkan dalam program dan pendanaan terkait

				asupan gizi, suplementasi, peningkatan sanitasi lingkungan dan peningkatan kesehatan ibu dan anak.
3.	(Yuni Prihatin Ningtyas, 2020)	Pengetahuan Ibu Berhubungan Dengan <i>Stunting</i> Pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Karangayu Kota Semarang.	Bertujuan meneliti adanya perbandingan signifikan antara prevalensi <i>stunting</i> anak balita dari ibu berpengetahuan tentang gizi dengan ibu yang tidak berpengetahuan tentang gizi	Disimpulkan tidak ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan kasus <i>stunting</i> dan terdapat hubungan yang signifikan antara ibu yang memiliki pengetahuan gizi dengan ibu yang tidak memiliki pengetahuan gizi
4.	(Zulfiqar A Bhutta, 2020)	<i>How Countries Can Reduce Child Stunting at Scale: Lessons From Exemplar Countries</i>	Menjelaskan temuan-temuan dari studi metode campuran di negara-negara teladan untuk memberikan panduan tentang cara mempercepat pengurangan <i>stunting</i> pada anak.	Secara ringkas peta jalan untuk mengurangi <i>stunting</i> pada anak dalam skala besar mencakup beberapa langkah terkait diagnostik, saling kerja sama antar pemangku kepentingan, dan penerapan intervensi nutrisi langsung maupun tidak langsung dengan cara pemasifan informasi pencegahan <i>stunting</i> baik dari sektor kesehatan maupun non kesehatan.
5.	(Yuliasti Eka Purnaning	<i>Analysis Of Related Stunting Prevention in Children Aged 2-5 Years</i>	Penelitian ini bertujuan menjelaskan tentang perilaku pencegahan <i>stunting</i> pada anak	Disimpulkan bahwa perilaku pencegahan <i>stunting</i> pada anak usia 2-5 tahun akan lebih efisien apabila terancang dan terstruktur pada teori <i>Health Promotion Model</i> (HPM). Di

	rum, 2021)		2-5 tahun yang baik berdasarkan teori <i>Health Promotion Model (HPM)</i>	penelitian ini disajikan data variabel dari faktor-faktor yang berhubungan dengan HPM membuktikan kenaikan hingga 1,26 X lebih baik dari pencegahan <i>stunting</i> tanpa panduan.
6.	(Mayasari, 2021)	Gambaran Kejadian Stunting di Kota Semarang	Mengetahui gambaran kejadian stunting di Kota Semarang	Masyarakat Kota Semarang masih menghiraukan stunting sehingga apabila balita yang sulit naik badan maka dianggap hal biasa
7.	(Wulandari Meikawati , 2021)	Berat Badan Lahir Rendah dan Anemia Ibu Sebagai Prediktor <i>Stunting</i> Pada Anak Usia 12-24 Bulan di Wilayah Puskesmas Genuk Kota Semarang.	Menganalisis berat badan lahir rendah dan anemia ibu sebagai prediktor <i>Stunting</i> anak balitanya	Mengetahui faktor-faktor penyebab <i>stunting</i> sedari calon ibu yang melahirkan
8.	(Indra, 2022)	<i>Understanding The Role Of Village Fund and Administrative Capacity in Stunting Reduction: Empirical Evidence From Indonesia</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dana desa terhadap prevalensi <i>Stunting</i> di Indonesia	Temuan Penelitian Menunjukkan bahwa program dana desa dapat secara signifikan menurunkan prevalensi <i>Stunting</i> di seluruh Indonesia kecuali di Pulau Jawa karena adanya variasi dana desa dan jumlah penduduk.. Ada juga kemungkinan endogenitas terkait dengan faktor lain yang mempengaruhi dana desa dan perbedaan preferensi kepala desa berdasarkan jenis kelamin dan preferensi terhadap isu

				<i>Stunting</i> karena sulitnya mendeteksi melalui data yang memadai.
9.	(Agung Dwi Laksono, 2022)	<i>Stunting Among Children Under Two Years in Indonesia Does Maternal Education Matter?</i>	Meneliti tentang proporsi anak dibawah dua tahun yang terdampak <i>Stunting</i> dengan pengaruh pendidikan ibunya	Hasil penelitian menunjukkan proporsi anak pendek di bawah dua tahun di Indonesia secara nasional adalah 20,1%. Ibu dengan kategori sekolah dasar 1.587 kali lebih mungkin untuk memiliki anak pendek dibawah dua tahun daripada ibu dengan pendidikan perguruan tinggi, sedangkan untuk ibu dengan pendidikan SMP 1.430 kali dan untuk ibu dengan pendidikan sebesar 1.230 kali.
10.	(Widya Cholid Wahyudin, 2023)	Prediksi Stunting Pada Balita di Rumah Sakit Kota Semarang Menggunakan <i>Naive Bayes</i>	Meneliti penggunaan teknologi dalam memprediksi bayi <i>Stunting</i>	Penelitian ini memberikan data hasil dari tingkat akurasi yang didapatkan dari pengujian yang telah dilakukan dari algoritma <i>Naive Bayes Classifier</i> dalam melakukan klasifikasi status gizi <i>stunting</i> .

Sumber: Dibuat dengan berbagai jurnal, 2023

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan Widya Hari Cahyati pada tahun 2019 dengan judul “Kajian *Stunting* di Kota Semarang” dengan metode kualitatif menghasilkan sebuah solusi untuk permasalahan *stunting* di Kota Semarang. Permasalahan yang muncul terkait dengan *stunting* adalah bagaimana proses penanganan *stunting* ini yang membutuhkan penanganan lintas sektoral dan dimensional dan memerlukan sinergitas antar para pihak untuk dapat mencegah dan menanggulangi *stunting* di Indonesia, khususnya Kota Semarang.

Pada penelitian Widya Hari Cahyati terdapat *gap* terhadap penelitian ini yaitu tidak adanya detail lokus dan permasalahan terbatas yang dibahas. Sehingga penelitian ini mengisi *gap* tersebut.

Penelitian oleh Sukri Palluturi, Aminuddin Syam, dan Aslina Asnawi yang dilakukan pada tahun 2020 dengan judul “*Stunting In a Political Context: A Systematic Review*.” Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa permasalahan kesehatan *stunting* di suatu negara atau kota bergantung dengan aspek politik negara atau kota tersebut. Dalam penelitian ini terjelaskan hubungan yang kuat antara dukungan atau komitmen politik pemerintah dengan kejadian *stunting* pada anak. Negara dan pemimpin regional yang memberikan perhatian terhadap penanganan *Stunting* dapat menurunkan prevalensi *stunting*. Komitmen tersebut ditunjukkan dalam program dan pendanaan terkait asupan gizi, suplementasi, peningkatan sanitasi lingkungan dan peningkatan kesehatan ibu dan anak.

Pada penelitian Sukri Palluturi, Aminuddin Syam, dan Aslina Asnawi menghadirkan sebuah ulasan mengenai permasalahan *Stunting* dengan sudut pandang politik. Penelitian ini mengisi *gap* yang ada terhadap penelitian tersebut yaitu menghadirkan sebuah kajian tentang implementasi kebijakan berdasarkan kebijakan yang telah dirancang sesuai dengan sudut pandang politik dari penelitian tersebut,

Penelitian oleh Yuni Prihatun Ningtyas, Ari Udoyono, dan Nissa Kusariana pada tahun 2020 dengan judul “Pengetahuan Ibu Berhubungan Dengan *Stunting* Pada

Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Karangayu Kota Semarang.” Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perbandingan terhadap jenis kelamin dan prevalensi *stunting* anak balita dari ibu berpengetahuan tentang gizi dengan ibu yang tidak berpengetahuan tentang gizi. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan tidak ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan kasus *stunting* dan terdapat hubungan yang signifikan antara ibu yang memiliki pengetahuan gizi dengan ibu yang tidak memiliki pengetahuan gizi sehingga dapat dijadikan informasi guna menulis skripsi ini.

Penelitian Yuni Prihatun Ningtyas, Ari Udoyono, dan Nissa Kusariana menghadirkan *gap* terhadap penelitian ini tentang kesesuaian implementasi kebijakan dengan kebijakan yang telah dibuat.

Pada penelitian Zulfiqar A. Bhutta, Nadia Akseer, dan Emily C Keats pada tahun 2020 yang berjudul “*How Countries Can Reduce Child Stunting at Scale: Lessons From Exemplar Countries.*” Secara ringkas, hasil dari penelitian ini adalah peta jalan untuk mengurangi *stunting* pada anak dalam skala besar mencakup beberapa langkah terkait diagnostik, saling kerja sama antar pemangku kepentingan, dan penerapan intervensi nutrisi langsung maupun tidak langsung dengan cara pemasifan informasi pencegahan *stunting* baik dari sektor kesehatan maupun non kesehatan.

Penelitian Zulfiqar A. Bhutta, Nadia Akseer, dan Emily C Keats menghadirkan ulasan mengenai kemampuan pemerintahan sebuah negara dapat mempengaruhi prevalensi *Stunting* yang ada, namun terdapat *gap* pada penelitian ini yaitu sebuah penjelasan mengenai implementasi kebijakan.

Penelitian oleh Yuliasti Eka Purnaningrum, dkk. Pada tahun 2021 yang berjudul “*Analysis Of Related Stunting Prevention in Children Aged 2-5 Years.*” Penelitian ini bertujuan menjelaskan tentang perilaku pencegahan *stunting* pada anak 2-5 tahun yang baik berdasarkan teori *Health Promotion Model (HPM)*. Disimpulkan

bahwa hasil dari penelitian ini adalah aperlaku pencegahan *stunting* pada anak usia 2-5 tahun akan lebih efisien apabila terancang dan terstruktur pada teori *Health Promotion Model* (HPM). Di penelitian ini disajikan data variabel dari faktor-faktor yang berhubungan dengan HPM membuktikan kenaikan hingga 1,26 X lebih baik dari pencegahan *stunting* tanpa panduan.

Gap pada penelitian Yuliasti Eka Purnaningrum, dkk dengan penelitian ini adalah mengenai penjelasan kebijakan negara yang menjadi sebuah acuan dalam mengatasi sebuah permasalahan.

Pada penelitian Mayasari dan Ovita pada tahun 2021 dengan judul “Gambaran Kejadian Stunting di Kota Semarang.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kondisi sosial masyarakat Kota Semarang mengenai kejadian *stunting* yang ada. Penelitian ini menjelaskan bahwa masyarakat Kota Semarang menghiraukan imbauan Pemerintah Kota Semarang mengenai pendataan di Posyandu terdekat, sehingga mengakibatkan Pemerintah Kota Semarang belum maksimal dalam melakukan pendataan. Dalam penelitian ini dijelaskan juga dalam kuesionernya bahwa masyarakat Kota Semarang menganggap balita yang kesulitan naik badan merupakan hal biasa dan tidak perlu ada tindakan khusus.

Penelitian Mayasari dan Ovita dengan penelitian ini memiliki sebuah *gap*. Penelitian Mayasari dan Ovita hanya menjelaskan mengenai tindakan masyarakat dalam menghadapi *Stunting*, sedangkan penelitian ini menghadirkan proses implementasi kebijakannya.

Pada penelitian Wulandari Meikawati, Dian Pertiwi Kisdi Rahayu, dan Indri Astuti Purwanti pada tahun 2021 dengan judul “Berat Badan Lahir Rendah dan Anemia Ibu Sebagai Prediktor *Stunting* Pada Anak Usia 12-24 Bulan di Wilayah Puskesmas Genuk Kota Semarang.” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berat badan lahir rendah dan anemia ibu sebagai prediktor *stunting* anak balitanya. Dalam

penelitian ini menjelaskan faktor-faktor penyebab *stunting* bisa disebabkan sedari dalam kandungan bahkan dari kondisi kesehatan calon ibu.

Penelitian Wulandari Meikawati, Dian Pertiwi Kisdi Rahayu, dan Indri Astuti Purwanti menghadirkan *gap* terhadap penelitian ini. Penelitian Wulandari Meikawati, Dian Pertiwi Kisdi Rahayu, dan Indri Astuti Purwanti digunakan penelitian ini untuk dapat memahami bagaimana *Stunting* dapat diprediksi menggunakan metode BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) dan anemia ibu sebagai prediktor *Stunting* sehingga dapat mempengaruhi dalam menganalisa sebuah implementasi kebijakan yang dihadirkan dalam penelitian ini.

Pada penelitian Indra, dan Jul pada tahun 2022 dengan judul “*Understanding The Role Of Village Fund and Administrative Capacity in Stunting Reduction: Empirical Evidence From Indonesia.*” Bertujuan untuk mengkaji signifikansi dana desa dengan prevalensi *stunting* di wilayahnya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa program dana desa dapat secara signifikan menurunkan prevalensi *stunting* di seluruh Indonesia kecuali di Pulau Jawa karena adanya variasi dana desa dan jumlah penduduk.. Ada juga kemungkinan endogenitas terkait dengan faktor lain yang mempengaruhi dana desa dan perbedaan preferensi kepala desa berdasarkan jenis kelamin dan preferensi terhadap isu *Stunting* karena sulitnya mendeteksi melalui data yang memadai.

Pada penelitian Agung Dwi Laksono, dkk. Pada tahun 2022 dengan judul “*Stunting Among Children Under Two Years in Indonesia Does Maternal Education Matter?*.” Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan temuan tentang proporsi anak dibawah dua tahun yang terdampak *Stunting* dengan pengaruh pendidikan ibunya. Hasil penelitian menunjukkan proporsi anak pendek di bawah dua tahun di Indonesia secara nasional adalah 20,1%. Ibu dengan kategori sekolah dasar 1.587 kali lebih mungkin untuk memiliki anak pendek dibawah dua tahun daripada ibu dengan

pendidikan perguruan tinggi, sedangkan untuk ibu dengan pendidikan SMP 1.430 kali dan untuk ibu dengan pendidikan sebesar 1.230 kali.

Penelitian Agung Dwi Laksono, dkk menghadirkan pemahaman mengenai pendidikan seorang ibu yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anaknya. *Gap* dengan penelitian ini adalah kebijakan publik dan implementasi kebijakan.

Pada penelitian Widya Cholid Wahyudin, Fida Maisa Hana, dan Agung Prihandono pada tahun 2023 dengan judul “Prediksi *Stunting* Pada Balita di Rumah Sakit Kota Semarang Menggunakan *Naïve Bayes*.” Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penggunaan teknologi *Naïve Bayes* dalam memprediksi calon bayi *stunting*. Penelitian ini memberikan data hasil dari tingkat akurasi lebih baik didapatkan dari pengujian yang telah dilakukan dari algoritma *Naïve Bayes Classifier* dalam melakukan klasifikasi status gizi *stunting*. Penelitian ini diperlukan penulis dalam skripsi untuk memberikan saran kepada Pemerintah Kota Semarang supaya sudah seharusnya menggunakan teknologi untuk melakukan *tracking* pada setiap calon bayi sehingga akan dimonitoring lebih lanjut tumbuh kembangnya.

Penelitian Widya Cholid Wahyudin, Fida Maisa Hana, dan Agung Prihandono menghadirkan pemahaman mengenai prediktor *Stunting* menggunakan teknologi *Naïve Bayes Classifier* dengan tingkat akurasi lebih baik sehingga dapat mempengaruhi analisa peneliti dengan menggunakan teori implementasi kebijakan berdasarkan dengan konteks masalah.

1. 6. 3. Administrasi Publik

Banyak para ahli yang memberikan definisi pada Administrasi Publik, diantaranya adalah Pfiffener dan Presthus dalam (Syafiie, 2010), Administrasi Publik adalah:

1. Administrasi Publik meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik;

2. Administrasi Publik dapat didefinisikan koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah;
3. Secara global, administrasi publik adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan, dan teknik-teknik yang tidak terhitung jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Menurut Nigro dan Nigro dalam Syafiie (Syafiie, 2010) definisi Administrasi Publik ialah:

1. Administrasi Publik adalah suatu kerja sama kelompok dalam lingkungan pemerintahan;
2. Administrasi Publik meliputi ketiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif, yudikatif serta hubungan di antara mereka;
3. Administrasi Publik mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah, dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik;
4. Administrasi Publik sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat;
5. Administrasi Publik dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perseorangan.

Berdasarkan pengertian Administrasi Publik oleh para ahli, yang dipaparkan dapat disimpulkan bahwa Administrasi Publik merupakan implementasi dari setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, dikoordinasi oleh kelompok swasta/pemerintah maupun perseorangan untuk melayani kebutuhan masyarakat.

Perkembangan suatu disiplin ilmu dapat ditelusuri dari perubahan paradigma. Paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau cara memecahkan suatu masalah, yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada

suatu masa tertentu. Apabila suatu cara pandang tertentu mendapat tantangan dari luar dan mengalami krisis atau anomali, maka kepercayaan dan wibawa dari cara pandang tersebut menjadi luntur atau berkurang. Orang mulai mencari cara pandang yang lebih sesuai, atau dengan kata lain muncul paradigma baru. Administrasi Publik, menurut Nicholas Henry dalam (Syafie, 2010) telah mengalami pergeseran paradigma, diantaranya sebagai berikut:

1. Dikotomi antara Publik dan Administrasi Publik (1900-1926). White dalam tulisannya dengan judul “*Politics of Administration*” pada tahun 1900 mengungkapkan bahwa pemerintah memiliki dua fungsi, yaitu fungsi publik untuk memusatkan perhatiannya pada pembuat kebijakan sesuai kehendak rakyat, dan fungsi administrasi untuk memberi perhatiannya kepada implementasi dari kebijakan tersebut. Paradigma ini hanya ditekankan pada lokusnya saja yaitu birokrasi pemerintahan tetapi fokus apa yang harus dikembangkan dalam administrasi publik kurang dibahas secara jelas dan terperinci.
2. Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937) Tokoh terkenal dalam paradigma ini adalah Willoughby, L. Gullick, dan L. Urwick yang sangat dipengaruhi oleh tokoh-tokoh manajemen klasik seperti Fayol dan Taylor. Mereka memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi sebagai fokus administrasi publik. Paradigma ini tidak mengungkapkan secara jelas dimana letak lokus administrasi publik.
3. Paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950-1970). Pada paradigma ini telah terjadi pertentangan bahwa seharusnya Administrasi Publik bebas nilai (*value-free*) dari kepentingan-kepentingan apapun namun kenyataannya Administrasi Publik tidak bebas nilai. Birokrasi pemerintah tidak lagi sebagai pelayanan publik namun sebagai kekuatan politik untuk mempertahankan kekuasaannya. Akibatnya, muncul paradigma yang

menganggap Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik, dimana lokusnya adalah birorasi, sedangkan fokusnya kabur.

4. Paradigma Administrasi sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970) Paradigma ini, prinsip-prinsip manajemen yang pernah populer dikembangkan secara ilmiah dan mendalam. Perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern, merupakan fokus paradigma Administrasi sebagai Ilmu Administrasi. Paradigma ini diasumsikan dapat diterapkan tidak hanya dalam dunia bisnis tetapi juga dalam dunia administrasi publik, oleh karena itu lokusnya menjadi tidak jelas.
5. Paradigma Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi Publik (1970-sekarang) Paradigma ini memiliki fokus dan lokusnya yang jelas, fokus administrasi publik adalah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik.

Berdasarkan penjelasan pergeseran paradigma Administrasi Publik yang dikemukakan oleh Nicholas Henry, ditemukan adanya pemisahan administrasi publik dan ilmu politik agar administrasi publik tetap bebas dari nilai dengan fokus administrasi publik sebagai pelayanan publik/masyarakat.

Selain Nicholas Henry, (Cheema, 2007) turut mengungkapkan bahwa terdapat empat fase administrasi publik yang juga menggambarkan perkembangan paradigma administrasi publik. Empat paradigma tersebut adalah:

1. *Traditional Public Administration*, yang berorientasi pada sebuah kehierarkian, kontinuitas, ketidakberpihakan, standarisasi, legal-rational, otoritas, dan profesionalitas.
2. *Public Management*, yang menguatkan pada penerapan prinsip-prinsip manajemen termasuk efisiensi dalam pemakaian sumber daya, efektivitas, orientasi pada pelanggan, dan lain-lain.

3. *New Public Management*, yang diarahkan pada prinsip fleksibilitas, pemberdayaan, inovasi, dan orientasi hasil yang berbasis kinerja.
4. *Governance*, suatu sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan dimana urusan-urusan ekonomi, sosial, dan politik dikelola melalui interaksi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Paradigma ini mengutamakan mekanisme dan proses dimana warga masyarakat dan kelompok dapat mengartikulasikan kepentingannya.

Paparan tersebut menggambarkan kedinamisan sebuah penyelenggaraan negara turut menghasilkan perkembangan sebuah ilmu tentang penyelenggaraan negara tersebut. Ilmu Administrasi Publik merupakan sebuah ilmu multidisiplin yang memiliki teori beserta paradigma berdasarkan jaman yang dapat diimplikasikan terhadap sebuah penyelenggaraan negara.

1. 6. 4. Kebijakan Publik

Dalam penyelenggaraan negara, kebijakan publik merupakan bentuk upaya pemerintah dalam melakukan regulasi yang menghasilkan pelayanan kepada masyarakatnya. (Handoyo, 2012) dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan tata kelola negara (*governance*), mengatur interaksi antara negara dengan rakyatnya. Signifikansi kebijakan publik sebagai komponen negara digunakan pemegang kekuasaan untuk mengendalikan negara sekaligus juga mengelola negara menjadi lebih baik.

Dalam kepustakaan internasional kebijakan publik disebut sebagai *public policy* yang berarti bahwa suatu aturan yang menata seluruh warga atau masyarakatnya. Kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan pemerintahan pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip, yaitu; perumusan formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan (Uddin B. Sore, 2017)

Tujuan kebijakan dapat bersifat politis, ekonomi, sosial, maupun hukum. Dari aspek politik, kebijakan publik ditetapkan untuk mendistribusikan dan mengalokasikan nilai-nilai, berupa barang dan jasa kepada seluruh anggota masyarakat. Dilihat dari sisi kekuasaan, kebijakan publik dibuat agar pemerintah dapat mempertahankan monopolinya terhadap masyarakat serta kekuasaan pemerintah atau negara dapat diterima dan diakui oleh masyarakat.

Secara ekonomi, kebijakan publik dibuat dengan tujuan (1) mendukung dan memfasilitasi pasar agar dapat menjalankan fungsinya dalam mengatur roda perekonomian secara bebas dan kompetitif, (2) memberi jaminan agar aktivitas ekonomi berlangsung tanpa ada tekanan dari pihak mana pun, (3) melumasi dan memperlancar roda perekonomian bergerak bebas dalam melakukan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi, dan (4) memberi jaminan dan melindungi kepentingan masyarakat yang tidak berdaya dari kekuasaan kapitalis.

Dari aspek sosial, kebijakan publik dibuat untuk (1) terwujudnya pengendalian sosial terhadap masyarakat, (2) mengatasi konflik sosial yang terjadi di masyarakat, dan (3) membangun relasi sosial di antara anggota masyarakat tanpa adanya diskriminasi.

Jika ditinjau dari aspek hukum, kebijakan publik disusun untuk (1) menciptakan keadilan dan ketertiban hukum di masyarakat, (2) memungkinkan masyarakat memahami dan mentaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau negara, dan (3) untuk masyarakat (Handoyo, 2012)

Akan tetapi (Abidin, 2002) memaparkan bahwa tidak semua kebijakan publik melewati prinsip, oleh karena itu disaringnya kebijakan publik menjadi beberapa kriteria. Berikut kriteria yang digunakan dalam menentukan salah satu diantara berbagai kebijakan:

1. **Efektivitas**

Mengukur suatu alternatif sasaran yang dicapai dengan suatu alternatif kebijakan yang dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan.

2. **Efisien**

Dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai.

3. **Cukup,**

Suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan sumber daya yang ada.

4. **Adil**

Suatu kebijakan memiliki tujuan untuk menguntungkan kepentingan bersama dengan meminimalisir kerugian dari lain pihak.

5. **Terjawab**

Kebijakan dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan sesuatu golongan atau suatu masalah tertentu dalam masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dianalisa bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah, yang memiliki tujuan tertentu dalam kepentingan seluruh masyarakat. Sebagai produk perundang-undangan, kebijakan publik seharusnya relevan dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan publik meliputi suatu proses memilih dan memilah berbagai alternatif terbaik untuk memecahkan masalah tertentu dalam masyarakat. Kebijakan publik juga mencakup proses pembentukan masalah, bagaimana memecahkannya, bagaimana penentuan kebijakannya, bagaimana kebijakan dilaksanakan, dan pengevaluasian. Untuk itu berdasarkan pada definisi-definisi yang telah dijelaskan mengenai kebijakan publik, penulis akan menggunakan teori kebijakan publik sebagai alat untuk menganalisis dalam memahami implementasi kebijakan dalam percepatan penanganan *Stunting* Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang.

1. 6. 5. Good Governance

Istilah Governance berasal dari Inggris yang berarti pemerintahan, yang berarti merupakan tata kelola dari pemerintah dalam penyelenggaraan negara (Jarkasih, 2023). Penggunaan istilah ini pertama kali digunakan oleh Woodrow Wilson sebagai Presiden Amerika Serikat ke-27 yang menyiratkan bahwa pemerintah harus dijalankan berdasarkan tata Kelola yang baik yang mana muncul istilah *Good Governance*.

Wacana *Good Governance* semakin dikampanyekan oleh lembaga swadaya internasional seperti; *World Bank*, *International Monetary Fund*, *Asian Development Bank*, dan *United National Development Program* (Dwiyanto, 2006). Dalam hal ini keniscayaan global atas perubahan peran pemerintah menjadi regulator dan operator minimalis sehingga memberikan pengaruh politik ekonomi secara luas hingga cakupan daerah-daerah kecil.

Situasi politik pemerintahan yang otoriter menjadi demokratis dan kegiatan desentralisasi berjalan secara gamblang. Dalam hal ini *Good Governance* menjadi pilihan instrument pemerintahan dengan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Perubahan-perubahan ini memunculkan kebutuhan baru berupa diperlukannya suatu asas atau prinsip pengelolaan pemerintahan agar sistem penyelenggaraan negara berjalan secara sistematis (Wijaya, 2018).

Merujuk *United Nations Development Programme (UNDP)* (UNDP, 1997) dalam (Wijaya, 2018) dikutip bahwa karakteristik sistem pemerintahan yang baik yaitu;

“Legitimasi, kebebasan berserikat dan partisipasi, kebebasan media, kerangka hukum yang adil dan mapan yang ditegakkan tanpa memihak, akuntabilitas, dan transparansi birokrasi, informasi yang tersedia secara bebas dan valid,

manajemen sektor publik yang efektif dan efisien, dan kerjasama antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.”

Selanjutnya, (Wijaya, 2018) memaparkan bahwa *UNDP* turut mengajukan prinsip-prinsip *Good Governance* sebagai berikut:

1. Partisipasi.

Setiap warga negara memiliki suara dalam pembuatan keputusan secara langsung maupun melalui mediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.

2. *Rule of Law.*

Aturan hukum, keputusan, kebijakan pemerintah, organisasi, badan usaha yang menyangkut masyarakat dilakukan berdasarkan hukum.

3. *Transparansi.*

Transparansi yaitu kebebasan arus informasi yang dapat diketahui untuk dikawal oleh banyak pihak mengenai kebijakan, dan proses-proses kelembagaan organisasi pemerintah

4. *Responsif.*

Lembaga-lembaga pemerintah harus tanggap, responsif terhadap kepentingan stakeholdernya.

5. *Berorientasi pada konsensus.*

Berorientasi kepada kesepakatan yang bisa menjadi perantara bagi kepentingan yang berbeda sebagai cara mencari alternatif terbaik dan membela kepentingan yang lebih luas.

6. *Kesetaraan.*

Kesetaraan antar gender dalam mendapatkan hak politik hingga memiliki hidup sejahtera.

7. *Efektifitas dan efisiensi.*

Menyelesaikan setiap proses aktifitas lembaga pemerintah sesuai dengan garis yang ditetapkan

8. Akuntabilitas.

Terbuka terkait anggaran dalam proses pembuatan keputusan maupun output kebijakan yang terkait.

9. Visi Strategis.

Para pemangku wewenang harus memiliki visi strategis dalam tata kelola *Good Governance* maka dari itu dibuatnya rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang bagi calon politik yang terpilih

Penelitian ini merupakan sebuah bentuk analisis dari upaya Pemerintah Kota Semarang dalam mencapai *Good Governance* dikarenakan kegiatan yang diupayakan merupakan tuntutan legitimasi dari masyarakat, sehingga peneliti memasukan teori *Good Governance* dalam penelitian ini.

1. 6. 6. Implementasi Kebijakan

Menurut Riant Nugroho dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik (Nugroho, 2003;158) *policy plan* atau implementasi dari sebuah kebijakan terdiri dari 20% kesuksesan, sedangkan kontrol implementasinya 60%, dan sisanya 20% bagaimana kita menyikapi hasil implementasinya. Implementasi kebijakan merupakan hal yang paling sulit, karena disini permasalahan yang terkadang tidak ditemukan dalam konsep akan muncul di lapangan. Pada dasarnya terdapat empat syarakt ketepatan yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu:

a. Tepat kebijakan

Teori ini memperhatikan sebuah hubungan dari kebijakan yang ditetapkan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Meskipun hal ini nantinya akan menimbulkan pertanyaan sendiri terkait dengan kebijakan terbaik apa yang semestinya dibuat, namun adanya analisa kontrol implementasi tepat kebijakan diperlukan guna pengadaan evaluasi jika diperlukan. Hal yang mendasari tepat kebijakan ialah sebagai penentu apakah

kebijakan tersebut memang senyatanya ditujukan untuk membuat perubahan yang baik atau tidak bagi masyarakat.

Kontrol implementasi tepat kebijakan tidak lepas dari produk kebijakan yang ada. Pada konteks kontrol implementasi tepat kebijakan, adanya produk kebijakan digunakan sebagai peneliti untuk mengidentifikasi hal tersebut menjadi pemecah masalah atau tidak. Sebagaimana semestinya tujuan kebijakan dibuat maka adanya kontrol implementasi tepat kebijakan digunakan sebagai analisa sebuah implementasi kebijakan untuk menghadirkan identifikasi apakah kebijakan yang dibuat memiliki hasil yang sesuai tujuan atau tidak.

Dalam penelitian ini ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penanganan *Stunting* di Kota Semarang dalam implementasinya di lingkup Kelurahan Tanjung Mas. Sebagai kelurahan dengan status *Stunting* tertinggi Se-Kota Semarang, sebuah hasil dari kebijakan harus terlihat dengan jelas. Bagian dari tepat kebijakan meliputi, karakter masalah yang sesuai dengan kebijakan, produk kebijakan yang dibuat, dan pengaruh kebijakan terhadap masalah.

b. Tepat pelaksana

Tepat pelaksana merupakan identifikasi dari lembaga pelaksana yang menjadi pilar dalam kebijakan yang dimaksud. Tepat pelaksana merupakan hal yang diperhatikan dalam sebuah implementasi kebijakan. Sebab dalam implementasi kebijakan pelaksana kebijakan merupakan muka dari sebuah kebijakan tersebut. Apabila pelaksana kebijakan tidak berkompeten dalam menjalankan tugas dan wewenangnya maka dapat

dinilai implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik. Demikian karena tepat pelaksana meliputi kebijakan yang bersifat monopoli atau derajat sebuah politik sebuah pemerintahan guna pemberdayaan masyarakat bersama masyarakat dan pihak swasta dengan tujuan mengarahkan sebuah kegiatan yang mengatasi permasalahan yang dimaksud.

Pada bagian ini sebuah ketepatan pelaksana dapat dilihat dari pihak yang berkaitan terhadap penerapan kebijakan. Biasanya dalam sebuah implementasi kebijakan hal ini tidak mengacu hanya kepada pemerintah seorang. Dalam teori ini terdapat dua lembaga pelaksana yang perlu diidentifikasi yaitu terdiri atas pemerintah, dan kelompok (masyarakat maupun swasta). Masing-masing bentuk pelaksanaan tersebut menjadi beban para pihak sesuai dengan porsi tanggungjawab dan kepentingan mereka. Misalnya di lingkup kegiatan strategis yang memengaruhi hajat hidup masyarakat secara mendasar seperti pelayanan kependudukan, pertahanan dan keamanan, sebaiknya berada di bawah naungan pemerintah.

Kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat seperti penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan keluarga, dan sebagainya, berada dalam posisi kerjasama antara pemerintah. Sedangkan kebijakan yang ada untuk kegiatan masyarakat seperti pengelolaan perusahaan, badan usaha, dan sebagainya, kemudian diserahkan kepada masyarakat secara swasta. Karena pada dasarnya tepat pelaksana merupakan cakupan struktur birokrasi, norma-norma, dan hubungan internal maupun eksternal birokrasi yang semuanya akan mempengaruhi implementasi suatu program.

Pada penelitian ini tepat pelaksana dapat dianalisa dari identifikasi peran implementor berdasarkan tugas dan fungsional lembaga pada

implementasi kebijakan percepatan penanganan *Stunting* di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang. Baik atau tidaknya sebuah kontrol implementasi tepat pelaksana diidentifikasi dari pelaksana kebijakan tidak berkompeten dalam menjalankan tugas dan wewenangnya maka dapat dinilai implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik. Demikian karena tepat pelaksana meliputi kebijakan yang bersifat monopoli atau derajat sebuah politik sebuah pemerintahan guna pemberdayaan masyarakat bersama masyarakat dan pihak swasta dengan tujuan mengarahkan sebuah kegiatan yang mengatasi permasalahan yang dimaksud.

c. Tepat target

Tepat target ini menghubungkan sasaran yang ingin dicapai, yakni terdapat dua hal. Pertama tumpang tindih dan intervensi terhadap kebijakan satu dengan kebijakan lainnya. Kebijakan yang saling tumpang tindih tentunya dapat berakibat pada kemunduran program yang telah direncanakan sebelumnya karena bisa jadi kedua kebijakan yang berbeda tersebut tidak saling mendukung satu sama lain.

Kedua adalah kondisi kesiapan target. Kondisi kesiapan target memiliki pengertian bahwa masyarakat sasaran kebijakan memiliki keinginan, mentaati, dan kesanggupan untuk mengikuti berbagai rangkaian produk kebijakan demi mencapai tujuan kebijakan. Kondisi kesiapan target kebijakan dalam hal ini diperhatikan karena mempengaruhi sebuah implementasi kebijakan. Kesiapan ini bukan hanya berupa sifat, namun juga kondisi fisik dan kondusifitas yang ada di dalam masyarakat.

Pada konteks penelitian ini sebuah kontrol implementasi ketepatan target diidentifikasi berdasarkan dua poin. Pertama adalah tumpang tindih dari dasar kebijakan yang diimplementasikan di Kelurahan Tanjung Mas yaitu Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2023. Poin kedua merupakan identifikasi dari kesiapan Masyarakat Kelurahan Tanjung Mas sebagai target sasaran pada lingkup penelitian ini sebagaimana penelitian ini berjudul

Implementasi Kebijakan Percepatan Penanganan *Stunting* di Kelurahan Tanjung Mas.

d. Tepat lingkungan

Lingkungan turut diperhatikan karena pada dasarnya nilai-nilai yang ada pada lingkungan dimana implementasi kebijakan berada dapat menentukan sebuah hasil pada implementasi kebijakan. Ketetapan lingkungan diidentifikasi berdasarkan tiga poin yang dijadikan sebagai faktor penentu kontrol implementasi sebuah ketepatan lingkungan. Tiga poin tersebut adalah kondisi sosial, kondisi kultural, dan kualitas interaksi antara lembaga lingkup kebijakan.

Poin pertama ialah kondisi sosial. Kondisi sosial dapat dianalisa sebagai keadaan yang berkaitan dengan masyarakat dan selalu berubah melalui proses sosial. Proses sosial ini terjadi karena adanya interaksi sosial. Kondisi sosial dapat mencakup seperti keadaan kesehatan, kemiskinan, dan lingkungan. Hubungan sebuah kondisi sosial pada arah implementasi kebijakan ialah karena kondisi sosial sebuah masyarakat dimana implementasi kebijakan berada harus selaras dengan sebuah produk kebijakan. Ketidak selarasan dapat diidentifikasi dari sebuah adanya konflik yang bersinggungan dengan kebijakan terkait.

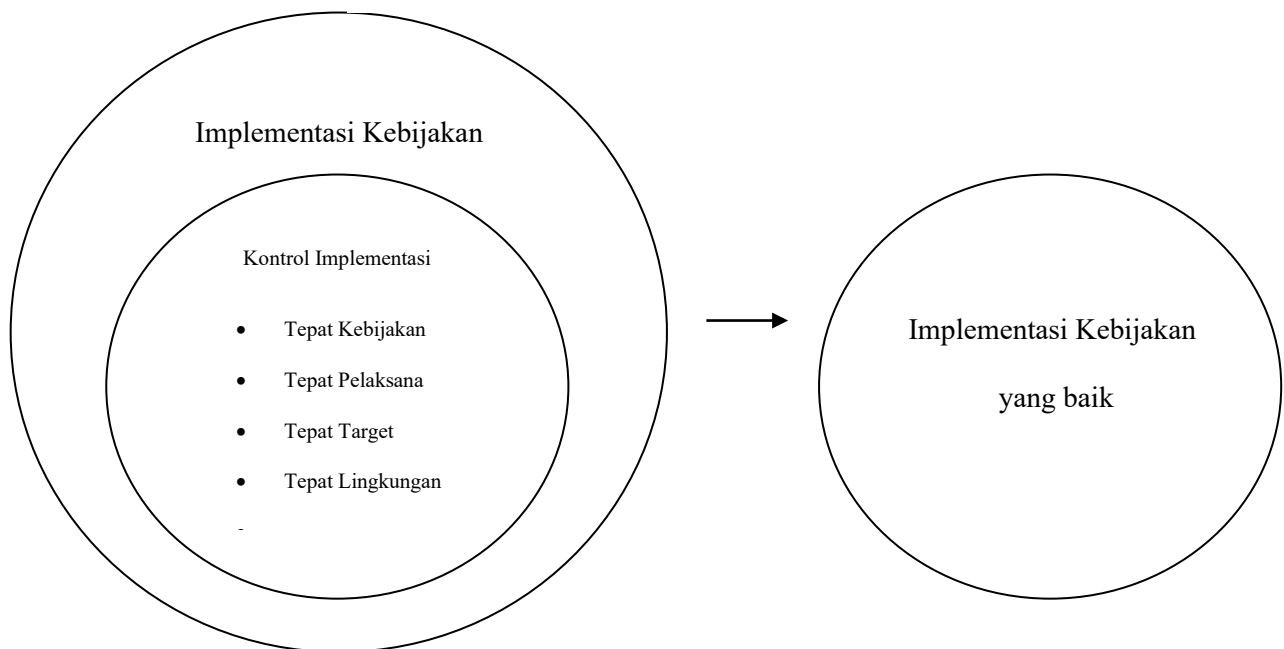
Pada poin kedua ialah kondisi kultural. Sebuah bahasan kondisi kultural tidak jauh dari faktor kebudayaan, dan tingkat pendidikan dari masyarakat. Pada dasarnya faktor kebudayaan dan tingkat pendidikan dapat berpengaruh kepada masyarakat dalam menyikapi sebuah kebijakan yang ada. Hal ini dapat membuat persepsi tersendiri dari masyarakat tanpa adanya upaya untuk mempelajari sebuah kebijakan yang ada.

Poin ketiga pada ketepatan lingkungan ialah kondisi kualitas komunikasi dalam koordinasi kebijakan. Pada poin ini dapat diidentifikasi dari model pendekatan sebuah kebijakan seperti kebijakan *top-down*, *bottom-up*, dan metode campuran. Setelah diidentifikasi maka perlu dikaji kualitas

dari koordinasi tersebut. Sebuah kualitas komunikasi dapat dilihat dari adanya sebuah komunikasi yang intens yang menghadirkan sebuah evaluasi.

Pada konteks penelitian ini ketiga poin pada ketepatan lingkungan dianalisa dari bagaimana kondisi sosial dan kondisi kultural pada masyarakat Kelurahan Tanjung Mas dalam menaati kebijakan yang ada. Pada kualitas koordinasi komunikasi dianalisa dari adanya sebuah komunikasi intens yang menghadirkan koordinasi pada implementasi kebijakan yang dilaksanakan di Kelurahan Tanjung Mas. Apabila ketiga poin tersebut menghadirkan sebuah konflik beserta hambatan maka dapat dianalisa bahwa kontrol implementasi pada tepat lingkungan tidak berjalan dengan baik.

Gambar 1 3. Model Implementasi Kebijakan Riant
Nugroho



Sumber: Analisis Peneliti

Dalam melakukan penelitian ini, penulis merasa bahwa teori implementasi kebijakan yang digagaskan oleh pakar kebijakan publik

Indonesia yaitu Riant Nugroho. Peneliti menganalisa bahwa penelitian ini yang berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan Percepatan Penanganan *Stunting* di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang” pada kasusnya relevan jika menggunakan teori implementasi kebijakan milik Riant Nugroho sebagai alat analisa. Gagasan Riant Nugroho tentang Implementasi Kebijakan menggambarkan situasi kebijakan publik di Indonesia, sebagaimana alur perumpamaan proses kebijakan dan implementasinya dapat dihubungkan dengan fakta yang ada di Indonesia sehingga perumpamaan yang dijelaskan dapat dikenali dan dipahami dengan mudah.

Sebagaimana penelitian ini merupakan sebuah analisis dari implementasi kebijakan yang ada di Indonesia, maka penggunaan teori implementasi kebijakan Riant Nugroho dianggap relevan sebagai alat analisa dalam melakukan observasi dan wawancara kepada pihak yang berkaitan dengan implemetasi kebijakan percepatan penanganan *stunting* di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang.

1. 6. 7. Pendekatan Implementasi Kebijakan

1) Pendekatan *Top Down*

Pendekatan *Top Down* menjadi pendekatan yang paling umum digunakan pada masa awal penerapan studi terhadap implementasi kebijakan. Pendekatan ini memiliki banyak perbedaan di kalangan para ahli, bahkan diantaranya justru lebih mengunggulkan pendekatan ini *bottom up* yang sebaliknya.

Secara sederhana, pendekatan ini merupakan alur kebijakan yang berasal dari otoritas pusat ke otoritas bagian bawahnya. Hal ini berarti segala bentuk instrument kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah pusat akan dibawa dan dilaksanakan oleh instansi yang berada di bawah kewenangannya. Menggunakan penjelasan dari Sabatier (1986), pendekatan *top-down* dilakukan oleh para peneliti dengan langkah sebagai

berikut: “*they started with policy decision (usually statute) and examined the extent to which its legally-mandated objectives were achieved over time and why*” dengan artian bahwa perumus kebijakan memulai keputusan kebijakan dengan mufakat kemudian memeriksa implementasinya sebagaimana tujuan yang diamanatkan secara hukum sehingga tujuan dapat dicapai dengan berjalannya waktu beserta penyebabnya.

Secara garis besar, tahapan-tahapan kerja pendekatan *top-down* menurut Erwan Agus Purwanto dalam bukunya *Implementasi Kebijakan Publik* adalah sebagai berikut:

- a. Memilih kebijakan yang akan dikaji.
- b. Mempelajari berkas-berkas dan dokumentasi kebijakan yang ada guna melihat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut secara formal.
- c. Mengidentifikasi keluaran-keluaran apa saja yang dihasilkan oleh paket kebijakan tersebut sebagai instrumen pelaksana dari pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan tersebut.
- d. Mengidentifikasi penerimaan kelompok sasaran dari keluaran kebijakan tersebut.
- e. Mengidentifikasi ada atau tidaknya manfaat yang dirasakan oleh kelompok sasaran dari keluaran kebijakan tersebut.
- f. Mengidentifikasi dampak yang dimunculkan pada kelompok sasaran sebagai akibat dari kebermanfaatan kebijakan yang telah mereka terima sebelumnya.

Pelaksanaan pendekatan ini dikenal dengan istilah pendekatan *command and control*. Sebagaimana arti dari terminologi tersebut, fokus utama dari pendekatan ini adalah aspek perintah dan pelaksanaan yang diberikan. Suatu kebijakan yang ada akan bergantung dari jelas atau tidaknya perintah yang diberikan oleh atasan kepada bawahannya. Bawahan yang telah menerima perintah tersebut, kemudian dikontrol oleh

kepentingan di atasnya supaya segala bentuk aktivitas pelaksanaan program dapat berjalan sebagaimana yang diinginkan.

2) Pendekatan *Bottom-Up*

Pendekatan *Bottom-Up* merupakan kasus sebaliknya dari pendekatan *Up-Bottom* namun dengan catatan bahwa aktivitas dalam lapangan dalam kepentingan kebijaksanaan tidak selalu sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali (negosiasi) antara para pelaksana kebijakan dengan pembuat kebijakan. Hal ini berkaitan dengan kritik dari otoritas bahwa kepada pusat bahwa keberhasilan suatu program kebijakan merupakan hal yang harus diperhatikan pada bentuk hubungan antara kepentingan bawah dengan pembuat kebijakan.

Menurut Adam Smith pada tahun 1973, implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses atau alur. Model Smith ini memandang proses kebijakan ini adalah proses antara perubahan sosial dan politik, di mana kebijakan yang ada sebelumnya tidak terlepas dari pengadaaan perbaikan maupun perubahan masyarakat yang menjadi sasaran program kebijakan. Menurut Smith, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

A. *Idealized policy*,

Kebijakan yang ideal dan telah dirumuskan sebagaimana harapan dari pembuat kebijakan, fungsinya adalah untuk mendorong serta merangsang pelaksanaan kelompok

B. *Target groups*,

Stakeholder kebijakan yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan

C. *Implementing organization*,

Bentuk badan-badan atau institusi-institusi yang mendapat tugas untuk menerapkan kebijakan

D. Environmental factors,

Faktor-faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap penerapan suatu kebijakan, contohnya adalah budaya, sosial, stabilitas ekonomi dan politik, dan lain-lain.

3) Pendekatan *Mix* (campuran)

Pendekatan implementasi campuran (mix) mulai muncul untuk membantu memahami proses pengambilan kebijakan. Pendekatan ini memiliki prinsip bahwa proses pengambilan kebijakan tidak dapat dipisahkan serangkaian bagian yang sifatnya tidak realistis dan menjadi satu kesatuan proses yang sama. Pada awalnya kontribusi terhadap suatu implementasi muncul bersamaan dengan pertimbangan model *Top-Down*, kemudian Paul A. Sabatier pada tahun 1986 memodifikasinya dengan evaluasi kasus model bottomup seperti yang dikembangkan Hjem dan Porter untuk dipakai pada dinamika implementasi organisasi. Pendekatan campuran (mix) sering digunakan untuk menjelaskan mengenai dinamika implementasi inter-organisasi dalam bentuk jaringan. Pendekatan ini disempurnakan melalui penggunaan konteks *policy subsystem* yang berarti semua aktor terlibat secara interaktif satu sama lain dalam proses politik dan perumusan kebijakan. Proses kebijakan yang dilihat melalui pendekatan ini merupakan sebuah proses satu kesatuan sistem yang bergerak dari satu bagian ke bagian lain secara berkesinambungan dan saling menentukan.

Berdasarkan uraian teori pendekatan implementasi, penelitian ini menggunakan implementasi *Top-Down* dikarenakan kebijakan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penanganan Stunting merupakan

kebijakan yang berasal dari otoritas pusat yang mengarahkan instansi-instansi dibawahnya untuk serentak mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan stunting yang turut merupakan agenda Pembangunan Nasional Indonesia. Kemudian di Kota Semarang terdapat Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penanganan *Stunting* di Kota Semarang kemudian dianalisa dari implementasi kebijakannya di Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang

1. 6. 8. Faktor Pendorong dan Hambatan Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu teknik yang memerlukan bekerjasama sangat bergantung terhadap faktor pendorong dan hambatan saat pengimplementasiannya

Menurut teori implementasi kebijakan oleh Riant Nugroho dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi memaparkan bahwa sebuah implementasi kebijakan memerlukan sebuah dukungan utama. Dukungan utama yang dimaksud ialah dukungan politik, dukungan strategik, dan dukungan teknis. Ketiga bentuk dukungan utama ini merupakan sebuah analisis dari kesatuan faktor pendorong maupun hambatan sebuah implementasi kebijakan. Sehingga apabila salah satu dari ketiga faktor tersebut terpenuhi maka akan menjadi sebuah pendorong tetapi sebaliknya, apabila salah satu dari ketiga faktor tersebut tidak terpenuhi maka akan menjadi sebuah faktor penghambat sebuah implementasi kebijakan yang dimaksud.

1. Faktor politik

Faktor politik dalam implementasi kebijakan berkaitan erat dengan dinamika kekuasaan, kepentingan aktor, dan lingkungan politik yang memengaruhi jalannya kebijakan. Kebijakan publik, menurut Riant Nugroho, memiliki dimensi politik yang kuat. Hal ini mencakup disposisi atau kemauan para pelaksana kebijakan untuk berkomitmen dan melaksanakan kebijakan. Selain itu, struktur birokrasi yang ada, yang seringkali merupakan produk dari pertimbangan politik, juga berperan besar. Lingkungan kebijakan dan eksternal kebijakan, termasuk dukungan atau resistensi dari berbagai pihak, juga menjadi bagian penting dari faktor politik. Implementasi dapat berhasil jika pihak-pihak yang terdampak kebijakan dilibatkan sejak awal, menunjukkan pentingnya dukungan dan legitimasi politik.

Apabila suatu kebijakan tidak memiliki dukungan politik maka dapat dinilai kebijakan tersebut tidaklah efektif dan tidak bisa terimplementasi secara tepat dan lancar. Jika dianalogikan bahwa sebuah dukungan politik terhadap implementasi kebijakan seperti mesin dengan kerangka motor, yaitu sebuah kerangka motor tidak bisa berjalan tanpa mesin dan sebuah mesin tidak akan berguna tanpa adanya kerangka motor. Dalam hal ini berarti bahwa sebuah kebijakan tidak bisa berjalan tanpa adanya dukungan politik, dan dukungan politik akan tidak menghasilkan sesuatu tanpa adanya kebijakan yang dirumuskan.

Pada penelitian ini konteks faktor politik sebagai pendukung atau penghambat diidentifikasi dari inovasi-inovasi yang dihadirkan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam upaya penurunan *Stunting* yang ada di Kelurahan Tanjung Mas. Jika ada inovasi yang dilakukan di Kelurahan Tanjung Mas dan memiliki tujuan yang sama maka dapat dianalisa bahwa terdapat dukungan politik dalam implementasi kebijakan percepatan penanganan *Stunting* di Kelurahan Tanjung Mas.

2. Faktor strategik

Faktor strategis merujuk pada pendekatan dan perencanaan yang digunakan untuk memastikan bahwa suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Riant Nugroho menekankan bahwa implementasi adalah "cara" sebuah kebijakan mencapai tujuannya. Aspek "lima tepat" yang ia sampaikan—tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses—merupakan inti dari faktor strategis. Ini termasuk merancang program dengan perincian tugas dan tujuan yang jelas, serta menentukan ukuran prestasi, biaya, dan waktu. Pilihan strategi implementasi, seperti pendekatan dari atas ke bawah (top-down) atau dari bawah ke atas (bottom-up), juga merupakan keputusan strategis yang memengaruhi efektivitas implementasi.

3. Faktor teknis

Faktor teknis berkaitan dengan aspek praktis, sumber daya, dan detail operasional yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan. Ketersediaan dan pengelolaan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, material, maupun metode, sangat krusial untuk implementasi yang efektif dan efisien. Komunikasi yang efektif juga merupakan aspek teknis penting, yang mencakup transmisi informasi yang jelas dan konsisten kepada semua pihak terkait. Selain itu, penggunaan prosedur dan metode yang tepat dalam pelaksanaan program serta efisiensi struktur birokrasi secara teknis juga memengaruhi seberapa lancar dan efektif implementasi kebijakan dapat berjalan di lapangan.

Respon masyarakat juga dapat diklasifikasi menjadi sebuah dukungan teknis. Apabila respon masyarakat bagus maka sebuah kebijakan yang hendak dijalankan akan lebih mudah dilaksanakan, namun apabila respon masyarakat terhadap kebijakan buruk maka sebuah kebijakan yang dirumuskan akan sulit untuk diterima masyarakat sehingga proses

implementasi kebijakan akan lebih sulit. Oleh karena itu sebuah kebijakan memerlukan sebuah dukungan teknis.

Dalam penelitian ini faktor pendorong dan penghambat mengacu pada teori implementasi kebijakan dari Riant Nugroho (Nugroho, 2003). Sebuah teori pendorong dan penghambat implementasi kebijakan Riant Nugroho ini sebagaimana paparan diatas apabila dalam implementasi kebijakan percepatan penanganan *Stunting* di Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara jika tidak memiliki dukungan diantara dukungan politik, strategik, dan teknis maka bisa dikategorikan bahwa dalam implementasi kebijakan tersebut terjadi sebuah hambatan sesuai dengan kategori dukungan dalam teori tersebut.

1. 7. Operasional Konsep

Analisis Implementasi Kebijakan yang berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Percepatan Penanganan *Stunting* merupakan sebuah arahan dalam penanganan *Stunting* yang menjadi dasar dalam penanganan *Stunting* di Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara. Pada operasional konsep kebijakan ini akan menggunakan fenomena implementasi kebijakan dan faktor pendorong dan penghambat menurut teori dari Riant Nugroho, yaitu:

1. Tepat kebijakan

Teori ini berfokus pada sebuah pemecahan masalah dari produk kebijakan yang ada. Secara ringkas, teori ini mengidentidkasi penilaian kesempurnaan kebijakan tersebut, karakter masalah yang sesuai dengan kebijakan, dan hubungan antara aktor kebijakan yang memiliki kewenangan dengan karakter kebijakannya

2. Tepat pelaksana

Dalam teori ini terdapat dua lembaga pelaksana yang perlu diidentifikasi yaitu terdiri atas pemerintah, dan kelompok (masyarakat

maupun swasta). Masing-masing bentuk pelaksanaan tersebut menjadi beban para pihak sesuai dengan porsi tanggungjawab dan kepentingan mereka. Misalnya di lingkup kegiatan strategis yang memengaruhi hajat hidup masyarakat secara mendasar seperti pelayanan kependudukan, pertahanan dan keamanan, sebaiknya berada di bawah naungan pemerintah.

3. Tepat target

Ketepatan ini berhubungan dengan sasaran yang ingin dicapai, yakni terdapat tiga hal. Pertama adalah identifikasi tumpang tindih dan intervensi terhadap kebijakan satu dengan kebijakan lainnya, dan kesiapan teraget untuk menjadi bagian dari kebijakan.

4. Tepat lingkungan

Terdapat tiga kondisi yang perlu diidentifikasi dari tepat lingkungan dari lokasi kebijakna terimplementasi. Kondisi yang dimaksud adalah kondisi sosial, kondisi kultural, dan kondisi kualitas komunikasi koordinasi.

Penelitian Analisis Implementasi Kebijakan Percepatan Penanganan *Stunting* di Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang turut mengidentifikasi masalah faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses pelaksanaan progam yang dianalisa melalui fenomena faktor politik, faktor strategis, dan faktor teknis sesuai ruang lingkup kebijakannya. Ketiga faktor tersebut akan diidentifikasi dengan penemuan apabila implementasi kebijakan memiliki unsur faktor politik, faktor strategis, dan faktor teknis yang mendukung maka implementasi kebijakan memiliki sebuah dukungan namun sebaliknya jika sebuah implementasi kebijakan tidak memiliki unsur yang terkandung dalam faktor tersebut maka akan dijadikan sebuah hambatan pada sebuah implementasi kebijakan. Penjelasan masing-

masing fenomena tersebut menggunakan teori pendukung dan hambatan dari Riant Nugroho (Nugroho, 2003) dengan rincian sebagai berikut;

1. Faktor politik

Dukungan politik dalam proses implementasi kebijakan mencakup kepada aktor dan instansi dari lingkungan proses penyelenggaraan negara. Dukungan politik berarti ialah kepentingan pemerintah dalam menjalankan tugas, Kepentingan pemerintah dinarasikan sebagai inovasi yang dihadirkan diluar instruksi dari kebijakan.

2. Faktor strategik

Dukungan strategik menjuru kepada sebuah perumusan kebijakan. Perlu adanya sebuah pertimbangan-pertimbangan dari pakar sesuai dengan bidangnya untuk membuat sebuah keputusan kemudian dibentuk kebijakan. Sebuah pertimbangan diperlukan supaya sebuah kebijakan yang dirumuskan tidak hanya mengacu kepada teori saja apa adanya. Apabila diringkas, sebuah dukungan strategi merupakan arah dari sebuah kebijakan dirumuskan sehingga perlunya sebuah dukungan dari pada pakar yang terkait untuk andil dalam sebuah perumusan kebijakan.

3. Faktor Teknis

Dukungan teknis dapat dikatakan sebuah wajah dari kebijakan. Hal ini dapat disimpulkan demikian karena dukungan teknis ialah produk kebijakan dari kebijakan terkait yang dapat terimplementasi dengan baik.

Tabel 1 6 Operasional Konsep

Tujuan Penelitian	Fenomena	Identifikasi	Deskripsi
Analisis Implementasi Kebijakan Percepatan Penanganan Stunting di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang	Tepat kebijakan	1. Identifikasi hubungan kebijakan dengan permasalahan 2. Identifikasi kebijakan sebagai solusi dari permasalahan	Pada penelitian ini tepat kebijakan sebagai tolak ukur sebuah tepat kebijakan, sebuah kebijakan yang telah disahkan harus bisa memecahkan masalah yang sesuai dengan masalahnya.
	Tepat pelaksana	1. Identifikasi adanya lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah yang berwenang	Pada penelitian ini tepat pelaksana merupakan cakupan struktur kebijakan, norma-norma dan instruksi yang mencakup hubungan internal maupun eksternal kebijakan. Pada dasarnya suatu implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik jika ada lembaga non-pemerintah yang ikut membantu mempengaruhi implementasi suatu program yang ada pada sebuah kebijakan.
	Tepat target	1. Identifikasi tumpang tindih dan intervensi antar kebijakan. 2. Identifikasi kesiapan target 3. Identifikasi sifat pembaharuan kebijakan yang tidak memiliki dampak stagnan	Pada penelitian ini tepat target merupakan sebuah hubungan kondisi kebijakan dengan sasaran yang ingin dicapai
	Tepat lingkungan	1. Identifikasi kondisi sosial 2. Identifikasi kondisi kultural 3. Identifikasi kualitas interaksi koordinasi	Pada penelitian bahasan tepat lingkungan menghadirkan tiga karakter yang menentukan sebuah implementasi kebijakan. Karakter tersebut ialah karakter sosial pada Kelurahan Tanjung Mas, karakter kultural Kelurahan Tanjung Mas, dan karakter kebijakan yang menghadirkan kualitas komunikasi antar OPD terkait
Faktor pendukung dan penghambat impementasi kebijakan percepatan penanganan stunting di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang.	Faktor politik	1. Inovasi Pemerintah Kota Semarang mengenai permasalahan yang diluar dari adanya instruksi kebijakan	Pada penelitian ini dukungan politik merupakan sebuah analisa dari kepentingan pemerintah terkait kebijakan. Dalam hal ini faktor politik sebagai kepentingan pemerintah dinarasikan dalam pencapaian tujuan kebijakan dengan cakupan inovasi yang diimplementasikan diluar instruksi kebijakan.
	Faktor strategik	1. Identifikasi dasar kebijakan yang berlaku	Pada penelitian ini dukungan strategik merupakan sebuah analisa bahwa ada atau

Sumber: Analisis Peneliti

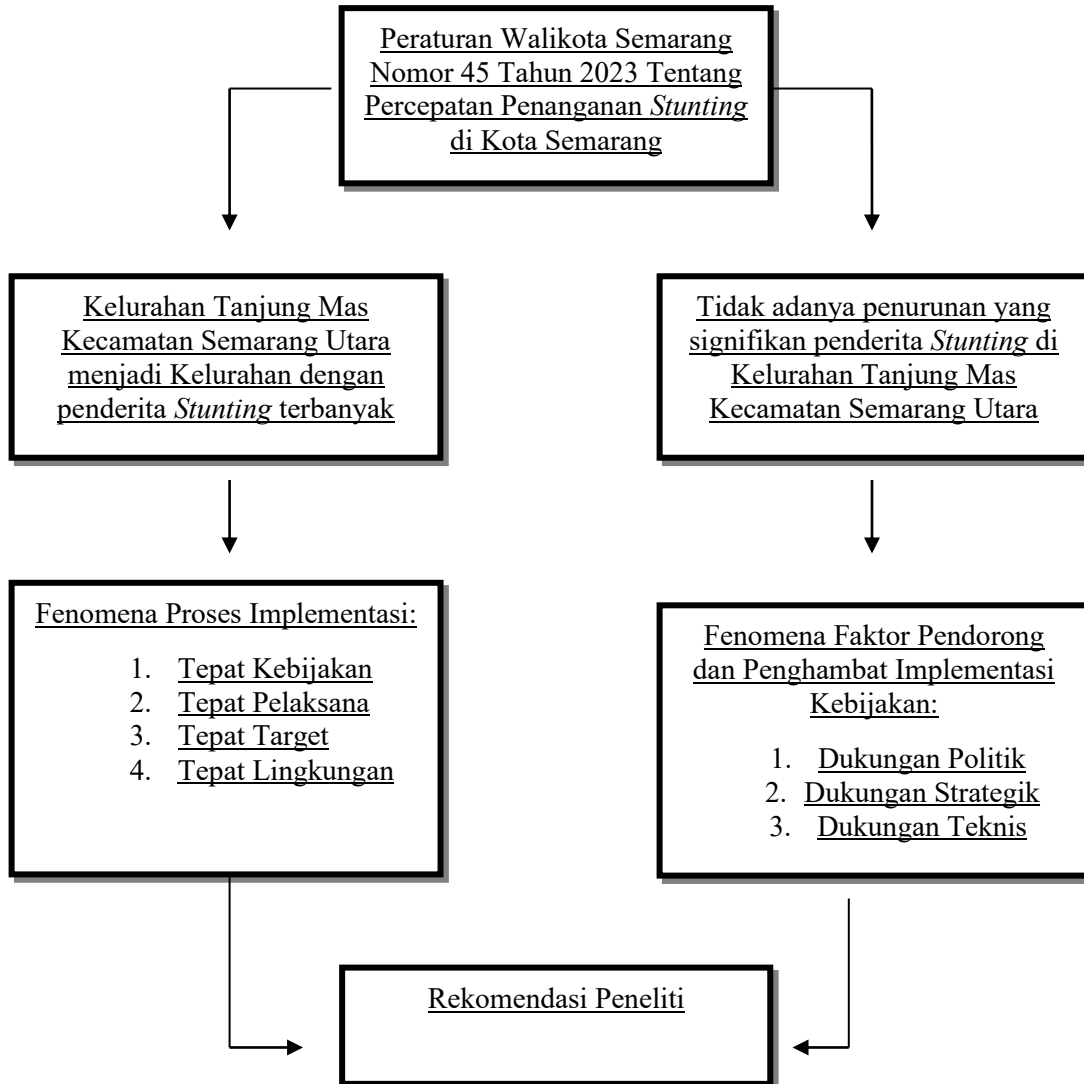
			tidak adanya dasar kebijakan dalam menghadapi sebuah permasalahan
	Faktor teknis	1. Identifikasi instruksi kebijakan yang terimplementasi	Pada penelitian ini dukungan teknis merupakan sebuah analisa sejauhmana kebijakan dapat terimplementasi dengan baik.

1. 8. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah alur pikir peneliti sebagai dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Didalam penelitian kualitatif, dibutuhkan sebuah landasan yang mendasari penelitian agar penelitian lebih terarah. Oleh karena itu dibutuhkan kerangka pemikiran untuk mengembangkan konteks dan konsep penelitian lebih lanjut sehingga dapat memperjelas konteks penelitian, metedologi, serta penggunaan teori dalam penelitian. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara teori dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila penelitian tersebut berkenaan atau berkaitan dengan fokus penelitian.

Pengertian dari kerangka berpikir sendiri adalah supaya terbentuknya suatu alur penelitian yang jelas dan dapat diterima. Sebuah kerangka pemikiran bukanlah sekedar sekumpulan informasi yang di dapat dari berbagai sumber-sumber, atau juga bukan sekedar sebuah pemahaman. Tetapi, kerangka pemikiran membutuhkan lebih dari sekedar data-data atau informasi yang relevan dengan sebuah penelitian, dalam kerangka pemikiran dibutuhkan sebuah pemahaman yang didapat peniliti dari hasil pencarian sumber-sumber, dan kemudian di terapkan dalam sebuah kerangka pemikiran. Pemahaman dalam sebuah kerangka pemikiran akan melandasi pemahaman-pemahaman lain yang telah tercipta terlebih dahulu. Kerangka pemikiran ini akhirnya akan menjadi pemahaman yang mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran lainnya. (Sugiyono, 2017)

Gambar 1 4 Kerangka Pemikiran



Sumber: Analisis peneliti

1. 9 Metode Penelitian

1. 9. 1 Tipe Penelitian

Pada penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut ahli Perreault dan McCarthy dalam (Setiawan, 2018) penelitian kualitatif merupakan model penelitian yang berupaya menelusuri data secara intensif dan terbuka atas semua respon jawaban. Selanjutnya menurut Sugiyono (2012:8), pendekatan kualitatif merupakan gaya penelitian yang digunakan untuk meneliti terhadap keadaan subjek/objek secara alami, peneliti merupakan instrumen kunci, mengumpulkan dan menganalisis data dengan triangulasi bersifat induktif, serta hasil penelitian lebih memfokuskan terhadap makna daripada generalisasi.

Kirk dan Miller dalam (Setiawan, 2018) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Hal tersebut mengidentifikasi hal-hal yang relevan dengan makna baik dalam beragamnya keadaan dunia keberagaman manusia, beragam tindakan, beragam kepercayaan dan minat dengan berfokus pada perbedaan bentuk-bentuk hal yang menimbulkan perbedaan makna.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian dengan metode deskriptif kualitatif adalah serangkaian aktivitas dengan tujuan guna mencari dan mendapatkan data mendalam dengan hasil lebih memfokuskan terhadap makna. Teknik pencarian sampel data dapat dilakukan secara *purposive* dan *snowball* dengan teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada menggeneralisir

Pada penelitian ini, metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif kualitatif, hal ini dikarenakan penelitian ini bertujuan dalam rangka

mengetahui dan memahami lebih lanjut mengenai analisa *Collaborative Governance* dalam Kebijakan Percepatan Penanganan Stunting Kota Semarang.

1. 9. 2 Situs Penelitian

Penelitian tidak dilakukan di seluruh *Stakeholder* dalam Kebijakan Percepatan Penanganan Stunting Kota Semarang dikarenakan terbatasnya waktu peneliti untuk lulus skripsi. Penelitian ini dilakukan di Kantor Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara dan rumah penerima manfaat. Situs tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki peran strategis dan terdapat narasumber yang berhubungan langsung dalam kegiatan penanganan *Stunting* di Kota Semarang.

1. 9. 3 Subjek Penelitian

Pada penelitian ini, subjek penelitian merupakan informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Teknik yang digunakan peneliti dalam pengambilan sampel atau subjek penelitian yakni menggunakan Teknik *purposive sampling*. Dengan teknik *purposive sampling* peneliti dapat memilih informan sebagai jenis dan sumber data untuk mengumpulkan data sesuai dengan kredibilitas informan tersebut.

Peneliti memiliki pertimbangan untuk memilih informan mana yang akan dimintai keterangan untuk penelitian di lapangan. Berdasarkan teknik sampling yang digunakan peneliti yaitu menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* memiliki unsur-unsur yang meliputi (1) kriteria pemilihan, (2) subjek atau unit sampel, (3) tujuan penelitian, (4) pengumpulan data, (5) validitas, dan (6) penentuan sampel. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* karena dapat menghadirkan penelitian dengan subjek dengan kriteria khusus dengan kedalaman informasi secara efisien tanpa ada kendala keterbatasan akses.

Penelitian ini menyesuaikan informan yang memiliki tugas, pokok, dan fungsi dalam Tim Pelaksanaan Penanganan Stunting di Kota Semarang sesuai dengan

Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Kota Semarang sehingga dinilai subjek penelitian akan menghasilkan informasi yang berkualitas dan kredibel.

1. 9. 4 Jenis Data

Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, skema, dan gambar. Lofland dalam (Moleong, 2010) menyatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Kata dan tindakan

Kata-kata hasil wawancara dan tindakan yang diamati merupakan sumber utama data dalam hal ini. Pencatatan sumber utama melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya. Peneliti dalam melakukan penelitian ini tentunya harus melihat dari segi aspek Kebijakan Percepatan Penanganan Stunting di Kota Semarang. Peneliti turut mewawancarai target informan untuk mendapatkan informasi mengenai analisa dari sebuah proses *Collaborative Governance* yang terjadi.

b) Sumber tertulis

(Moleong, 2010) menyatakan bahwa jika ditinjau dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan merupakan sumber tertulis yaitu berupa buku, jurnal, artikel di internet, dan dokumen resmi. Dokumen resmi didapatkan di Web Semarang Satu Data, Web Pemerintah Kota

Semarang, Dinas Kesehatan Kota Semarang, dan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Kota Semarang.

1. 9. 5 Sumber Data

Pada penelitian ini, sumber data berdasarkan primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan sebuah pengambilan data dari target informan yang telah dianggap mumpuni dan dipercaya mengenai pertanyaan yang akan disampaikan oleh peneliti. Karakteristik informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini berdasarkan regulasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Semarang

Berdasarkan pengambiland data tersebut, maka sumber data yang memungkinkan adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu hasil data yang bersumber dan didapatkan secara langsung dari subjek/objek penelitian oleh peneliti. Sumber penelitian yaitu informan kunci yang telah ditentukan selanjutnya. Data Primer yang didapatkan pada penelitian ini adalah data hasil wawancara dengan *purposive sampling*.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu hasil data yang didapatkan tidak langsung dari subjek/objek penelitian. Peneliti mendapatkan data tersebut dari data yang sudah diolah dan dikumpulkan oleh orang lain. Data ini didapatkan dengan cara mengambil data dari buku, artikel jurnal, artikel berita, serta dokumen lain yang berhubungan dengan topik penelitian. Data Sekunder yang didapatkan pada peneliitan ini berasal dari laporan, artikel, jurnal, dan buku.

1. 9. 6 Analisis dan Interpretasi Data

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam proses pengolahan data yaitu bergerak diantara perolehan data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan beserta verifikasi. Dengan demikian data-data dari deskripsi yang telah didapatkan dapat disusun pengertian dengan pemahaman arti atau reduksi data, kemudian diikuti sajian data yang sistematis untuk ditarik kesimpulan beserta verifikasi berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan aktivitas memilah, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah bentuk data-data dari hasil pengumpulan data, agar data tersebut dapat memberikan representasi yang lebih jelas atas hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dari penelitian (Moleong, 2010). Dengan demikian data yang direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan akan lebih mempermudah peneliti. Dengan melakukan reduksi data, maka peneliti akan merangkum dan mengambil data pokok yang penting dan memudahkan dalam pemilahan untuk kategorisasi data.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kumpulan data dan informasi yang telah disusun untuk membantu menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Pada penelitian kualitatif, data disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel, grafik, dan lain-lain. Data yang disajikan dengan baik akan memudahkan peneliti dalam memahami makna dan informasi atas data tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

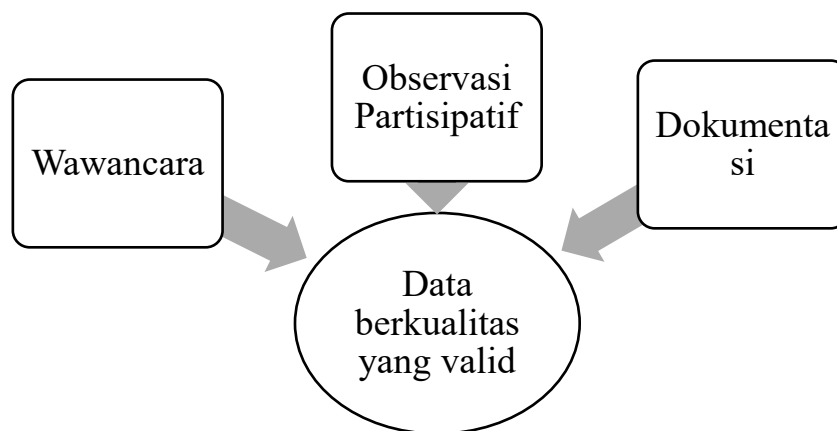
Penarikan kesimpulan merupakan aktivitas membuat simpulan pada data yang telah disajikan menjadi lebih bermakna lebih umum, namun tetap melakukan pembatasan pada ruang lingkup studi penelitian yang telah di tentukan agar tidak

terlalu meluas dan dapat isi penelitian. Temuan dalam kesimpulan kualitatif dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas kemudian menjadi jelas, hal ini dapat berupa hubungan kausalitas, interaktif, hipotesis, dan teori (Sugiyono, 2017).

1. 9. 7 Kualitas Data

Teknik yang digunakan untuk menguji data yaitu menggunakan teknik triangulasi data. Teknik Triangulasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara yang mendalam, serta dokumentasi untuk sumber data beserta verifikasi sehingga menghasilkan data berkualitas yang valid.

Gambar 1 5 Kualitas Data



Sumber: Analisis peneliti